KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH
DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN SISWA
(Studi kasus di SD Islam Arrisalah Slahung)

TESIS

Oleh :

Usamah Hanif

NIM : 212216059

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONOROGO
PASCASARJANA
2019

ABSTRAK

Hanif, Usamah. Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di SD Islam Arrisalah Slahung Ponorogo. Tesis Jurusan Manajemen Pendidikan Agama Islam Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Nur Kolis, P.hD

Kata Kunci : Kebijakan Kepala Sekolah, Kedisiplinan Siswa

Kebijakan peningkatan kedisiplinan adalah bagian dari usaha dalam peningkatan pendidikan peserta didik agar mendapat mutu yang baik. SD Islam Arrisalah merupakan sekolah berbasis pesantren yang berada di lingkungan pesantren. Di sekolah ini ada siswa yang mukim dan ada yang non mukim, dengan berbagai prolematika yang ada karena perbedaan sistem ini, diantaranya keterlambatan masuk sekolah, bolos, kabur dari asrama dan lain sebagainya, dengan adanya dua model ini maka perlu adanya penerapan sistem pembelajaran dan aturan sekolah yang mencakup keduanya termasuk juga konsep dan kebijakan kedisiplinan yang mencakup keduanya seimbang dan terarah bersifat mengatur sesuai model siswa yang mukim atau yang tidak mukim.

Adapun rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah (1) apa kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa? (2) Bagaimana implementasi kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa? (3) Bagaimana evaluasi kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Adapun lokasi penelitiannya berlokasi di SD Islam Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil Penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di SD Islam Arrisalah adalah membuat program santri mukim dan non mukim, menjadikan guru sebagai teladan bagi siswanya, menciptakan forum dan kegiatan untuk penguatan kedisiplinan siswa, musyawarah besar tahunan untuk menentukan dan menyepakati bersama program-program kebijakan kedisiplinan. (2) Implementasi kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di SD Islam Arrisalah berjalan sesuai dengan perumusan kebijakan yang telah ditetapkan. Pelaksana kebijakan dalam hal ini adalah seluruh *stakeholder* yang ada sedangkan penanggung jawabnya adalah wakil kepala bagian kurikulum dan kesiswaan, dengan menerapkan evaluasi pekanan yang menyeluruh menghasilkan program yang diinginkan bisa berjalan sesuai kebijakan, monitoring kepala sekolah sehingga memunculkan kepatuhan dan kesungguhan. (3) Evaluasi kebijakan dilakukan oleh kepala sekolah SD Islam Arrisalah dalam meningkatkan kedisiplinan adalah dengan mengevaluasi program-program kebijakan yaitu tentang aturan kedisiplinan dilingkup sekolah dan asrama, menciptakan pembiasaan kedisiplinan siswa, pembinaan kedisiplinan guru dan siswa. Dari evaluasi ini menggambarkan realita yang muncul, dari proses implementasi kebijakan dan monitoring menghasilkan nilai-nilai kebijakan yang bisa diklarifikasi dengan fakta yang ada. Adapun kekurangannya adalah kurang maksimalnya dibeberapa aspek karena

faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga mengharapkan agar sekolah dapat memenuhinya agar terlaksana kebijakan yang telah ditentukan.

ABSTRACT

Hanif, Usamah. The Principal Policy in Improving Student Discipline at Arrisalah Islamic Elementary School Slahung Ponorogo. Thesis Department of Management of Islamic Religious Education Graduate, State Islamic Institute (IAIN) Ponorogo. Advisor: Nur Kolis, P.hD

Keywords : The Principal Policy, Student Discipline.

The policy of increasing discipline is part of the effort to improve the education of students in order to get good quality. Arrisalah Islamic Elementary School is a boarding school based in a boarding school. In this school there are students who reside in hostel and there are no reside. with various prolematics that exist because of the differences in this system, including late school entry, skipping school, running away from the dormitory and so fort, with the existence of these two models, it is necessary to implement a learning system and school rules that include both including concepts and disciplinary policies that include both balanced and directed in accordance with the models of students who are reside in hostel and there are no reside.

The formulation of the problem in this study is (1) what is the principal's policy in improving student discipline? (2) What is the implementation of the principal's policy in improving student discipline? (3) What is the evaluation of the principal's policy in improving student discipline? This study used a qualitative approach with case study design. The research location is located in the Islamic Elementary School of Arrisalah Slahung Ponorogo. For data collection techniques using interview techniques, observation and documentation.

The results of this study are as follows: (1) The principal's policy in improving student discipline at the Islamic Elementary School in Arrisalah is to create a program the models of students who are reside in hostel and there are no reside, make the teacher an example for their students, creating forums and activities to strengthen student discipline, annual grand deliberation to determine and agree on disciplinary policy programs. (2) The implementation of the principal's policy in improving student discipline at the Arrisalah Islamic Elementary School runs in accordance with the formulated policies and implemented by all stakeholders (3) The policy evaluation was carried out by the elementary school principal in improving student discipline has described the reality that arises, explain the progam, from the process of implementing the policy and monitoring produce policy values which can be clarified by the facts, The disadvantages are the unmaximum in several aspects because inadequate facilities and infrastructure.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA
Terakriditasi B sesuai SK BAN PT Nomor : 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat : Jl Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 fax. (0352) 461893
Website : www.iainponorogo.ac.id Email : Pascasarjana@stainponorogo.ac.id

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
Institut Agama Islam Negeri
Ponorogo
Di
Ponorogo

NOTA PERSETUJUAN

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memimbing, dan melakukan perbaikan seperlunya, maka tesis saudara :

Nama : Usamah Hanif
NIM : 212216059

Dengan Judul : Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di SD Islam Arrisalah Slahung

Telah kami setujui dan dapat diajukan untuk memenuhi tugas akhir dalam menempuh Pascasarjana (S2) pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam IAIN Ponorogo.

Dengan ini kami ajukan tesis tersebut pada sidang tesis yang diselenggarakan oleh tim penguji yang ditetapkan oleh Diektur Pascasarjana.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Ponorogo, 3 Juli 2019
Pembimbing

Nur Kolis, P.hD
NIP 196704132000031002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA
Terakriditasi B sesuai SK BAN PT Nomor : 2619/SK/BAN-PT/Ak-SURV/PT/XI/2016
Alamat : Jl Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 fax. (0352) 461893
Website : www.iainponorogo.ac.id Email : Pascasarjana@stainponorogo.ac.id

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul."Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di SD Islam Arrisalah " yang ditulis oleh Usamah Hanif, NIM 212216059, telah dipertahankan di depan dewan penguji tesis dan telah diperbaiki sesuai saran-saran Tim Penguji pada ujian tesis rabu, 7 Agustus 2019.

TIM PENGUJI :

1. Ketua Sidang
   Dr. Aksin Wijaya, M.Ag (.....)
   NIP. 197407012005011004 6 September 2019

2. Penguji I
   Dr. Mukhibat, M.Ag (.....)
   NIP. 197311062006041017 6 September 2019

3. Penguji II
   Dr. Nur Kolis, Ph.D. (.....)
   NIP. 196704132000031002 6 September 2019

Ponorogo, 6 September 2019

Mengesahkan

Direkur Pasca IAIN Ponorogo

Dr. Aksin Wijaya, M.Ag
NIP. 197407012005011004

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Usamah Hanif
NIM	: 212216059
Fakultas	: Pascasarjana
Program Studi	: S2 Manajemen Pendidikan Islam
Judul Skripsi/Tesis	: Kebijakan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa Studi Kasus di SD Islam Arrisalah Slahung

Menyatakan bahwa naskah skripsi / tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 12 September 2019

Usamah Hanif

Scanned with CamScanner

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Usamah Hanif

NIM : 212216059

Program Pendidikan : Manajemen Pendidikan Islam

Perguruan Tinggi : Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo

Menyatakan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul "Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di SD Islam Arrisalah Slahung Ponorogo" adalah benar-benar hasil karya sendiri didalamnya tidak terdapat plagiat karya orang lain dan tidak mengutip kecuali dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 2 Juli 2019

Penulis

Usamah Hanif

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar anak didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kedisiplinan, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.[1]Perencanaan peserta didik, termasuk di dalamnya adalah: *school census, school size, class size* dan *efective class*. Penerimaan peserta didik, meliputi penentuan: kebijaksanaan penerimaan peserta didik, sistem penerimaan peserta didik, kriteria penerimaan peserta didik, prosedur penerimaan peserta didik, pemecahan problema-problema penerimaan peserta didik. Orientasi peserta didik baru, meliputi pengaturan: hari-hari pertama peserta didik di sekolah, pekan orientasi peserta didik, pendekatan yang dipergunakan dalam orientasi peserta didik, dan teknik-teknik orientasi peserta didik. Mengatur kehadiran dan ketidak hadiran peserta didik di sekolah. Termasuk di dalamnya adalah: peserta didik yang membolos, terlambat datang dan meninggalkan sekolah sebelum waktunya.[2]

Disiplin secara luas, menurut conny diartikan sebagai semacam pengaruh yang dirancang untuk membantu anak mampu menghadapi tuntutan dari lingkungannya. Disiplin itu tumbuh dari kebutuhan untuk menjaga keseimbangan antara kecenderungan dan keinginan individu untuk berbuat sesuatu yang dapat dan ingin ia peroleh dari orang lain atau karena situasi kondisi tertentu, dengan batasan peraturan yang diperlukan terhadap

---

[1] Abdussalam, *Manajemen Insani dalam Pendidikan*,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 7

[2] Basuki, *Manajemen Kesiswaan (peserta didik)*, (Jakarta, 2007)

dirinya atau lingkungan dimana ia hidup.[3]Disiplin adalah patuh terhadap suatu peraturan dengan kesadaran sendiri untuk terciptanya tujuan itu.[4]Sedangkan menurut Amir Daien Indrakusuma menyebutkan bahwa disiplin merupakan kesediaan untuk mematuhi peraturan-peraturan dan larangan-larangan.[5] Kepatuhan disini bukan hanya patuh karena adanya tekanan-tekanan dari luar, melainkan kepatuhan yang didasari oleh adanya kesadaran tentang nilai dan pentingnya peraturan-peraturan dan larangan tersebut. Disiplin adalah latihan pikiran, perasaan, kehendak dan watak, latihan pengembangan dan pengendalian perasaan, pikiran, kehendak dan watak untuk melahirkan ketaatan dan tingkah laku yang teratur.[6]

Fenomena kenakalan remaja ditangerang yang bolos ingin tawuran dan berkelahi dengan siswa SMA yang lain hingga terjadi saling bacok dan hampir tewas.[7] Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan duka mendalam dan keprihatin atas tewasnya SR (8), seorang siswa kelas II SDN Longkewang, Desa Hegarmanah, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. SR meregang nyawa setelah berkelahi dengan rekannya di lingkungan sekolahnya.[8] Aksi brutal siswa-siswi salah satu SD di Bukittinggi sempat membuat ramai jejaring sosial. Masalah ini pun telah diselesaikan secara kekeluargaan, dengan semua pihak saling minta maaf. Menurut pakar psikologi Reza Indragiri Amriel, peristiwa pemukulan seorang siswi itu bisa terjadi karena sifat pemarah dan cenderung agresif dari 6 temannya. Ditambah dengan situasi dan kondisi sekolah yang terkesan mengabaikan siswa-siswinya.[9]

PONOROGO

[3]Conny Semiawan, *Pendidikan Keluarga Dalam Era Global*, (Jakarta: PT Prenhallindo, 2002), 90

[4]Subari, *Supervisi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 164.

[5]Amir Daien Indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Malang: Usaha Nasional, 1973), 142

[6]Sukarna, *Dasar-dasar Manajemen*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), 104.

[7] http://news.liputan6.com, diakses tanggal 20 maret 2018

[8] www.merdeka.com, diakses tanggal 26 juni 2019

[9] https://news.detik.com/berita, diakses pada tanggal 26 juni 2019

Dari fenomena diatas bahwa fungsi utama disiplin adalah untuk mengajar mengendalikan diri dengan mudah, menghormati dan mematuhi otoritas. Dalam mendidik anak perlu disiplin, tegas dalam hal apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang dan tidak boleh dilakukan. Disiplin perlu dalam mendidik anak supaya anak dengan mudah untuk dapat (1) Meresapkan pengetahuan dan pengertian sosial secara mendalam dalam dirinya (2) Mengerti dengan segera menurut untuk menjalankan apa yang menjadi kewajibannya dan secara langsung mengerti larangan-larangan yang harus ditinggalkan (3) Mengerti dan dapat membedakan tingkah laku yang baik dan tingkah laku yang buruk (4) Belajar mengendalikan keinginan dan berbuat sesuatu tanpa adanya peringatan dari orang lain.[10]

Sebuah proses pendidikan tidak akan berhasil jika tidak ada penerapan disiplin kepada para siswa. Disiplin adalah kemampuan memanfaatkan waktu untuk melakukan hal-hal yang positif guna mencapai sebuah prestasi. Disiplin juga berarti kemampuan berbuat hanya yang memberikan manfaat bagi diri, orang lain, dan lingkungan. Kedisiplinan siswa di sekolah-sekolah sekarang ini telah banyak yang berubah tidak lebih baik dari sebelumnya. Ini terjadi oleh sebab tiadanya teladan para pendidik dan tenaga kependidikan serta kepala sekolah, di lain pihak karena rapuhnya tata tertib sekolah. Lemahnya perhatian sekolah pada penegakkan peraturan merupakan sebab kerapuhan tersebut. Karena itu, saatnya pengelola sekolah memprioritaskan tegaknya budaya disiplin di kalangan para siswa, sehingga perilaku dan prestasi siswa makin membanggakan.

Sejak awal, para siswa harus dikenalkan dengan lingkungan sekolah yang menghargai dan menjunjung tinggi kedisiplinan. Sekolah harus bisa meyakinkan pada para siswa bahwa perilaku baik dan prestasi cemerlang hanya bisa diraih dengan kedisiplinan tinggi para siswa. Tanpa kedisiplinan, fungsi sekolah akan hilang dan potensi siswa akan terkubur, bahkan akan banyak siswa terlibat masalah. Hanya sedikit sekolah yang berhasil menjalankan kedisiplinan. Faktanya bisa kita lihat melalui potret

[10] Y. Singgih D.Gunarsa & Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Untuk Membimbing*, (Jakarta:BPK Gunung Mulia, 1995), 136

lingkungan sekolah yang tidak bersih, siswa yang gemar merokok, dan siswa tawuran. Semua itu cermin perilaku tidak disiplin dan tidak berbudaya. Jika demikian yang terjadi, sekolah sulit menjadi tempat munculnya generasi-generasi yang berperilaku baik dan berprestasi.

PP No 19 tahun 2017, yang menyatakan bahwa kepala sekolah bukan lagi guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, namun jabatan yang memiliki beban kerja sebagai kepala satuan yang sepenuhnya untuk melaksanakan tugas menejerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.[11]

Seorang siswa dalam mengikuti kegiatan belajar di sekolah tidak akan lepas dari berbagai peraturan dan tata tertib yang diberlakukan di sekolahnya, dan setiap siswa dituntut untuk dapat berperilaku sesuai dengan aturan dan tata tertib yang yang berlaku di sekolahnya. Kepatuhan dan ketaatan siswa terhadap berbagai aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolahnya itu biasa disebut disiplin siswa. Sedangkan peraturan, tata tertib, dan berbagai ketentuan lainnya yang berupaya mengatur perilaku siswa disebut disiplin sekolah/kelas. Disiplin sekolah adalah usaha sekolah untuk memelihara perilaku siswa agar tidak menyimpang dan dapat mendorong siswa untuk berperilaku sesuai dengan norma, peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Menurut Wikipedia (1993) bahwa disiplin sekolah "*refers to students complying with a code of behavior often known as the school rules"*. Yang dimaksud dengan aturan sekolah (*school rule*) tersebut, seperti aturan tentang standar berpakaian (*standards of clothing*), ketepatan waktu, perilaku sosial dan etika belajar/kerja. Pengertian disiplin sekolah kadangkala diterapkan pula untuk memberikan hukuman (sanksi) sebagai konsekuensi dari pelanggaran terhadap aturan, meski kadangkala menjadi kontroversi dalam menerapkan metode pendisiplinannya, sehingga terjebak dalam bentuk

[11] PP no 19 tahun 2017

kesalahan perlakuan fisik (*physical maltreatment*) dan kesalahan perlakuan psikologis (*psychological maltreatment*).[12]

SD Islam Arrisalah merupakan Sekolah berbasis pesantren yang mana sekolah ini berada di dalam lingkungan pesantren yaitu di Pondok Modern Arrisalah Slahung Ponorogo, sehingga iklim pesantren menjadi bagian dari proses pembelajaran di sekolah ini. SD Islam Arrisalah ini sekolah yang mempunyai asrama bagi santri tingkat sekolah dasar yang ingin mondok dan belajar agama dan menghafal Al-Qur'an, sehingga di sekolah ini ada dua sistem siswa mukim dan siswa *anshor* (sebutan bagi siswa yang tidak mukim) yang sekolah saja tidak berasrama.

Setelah peneliti menemui Mada Indarta salah satu guru di SD Islam Arrisalah, beliau mengatakan bahwa dengan adanya dua model siswa yang belajar di sekolah ini maka perlu adanya penerapan sistem pembelajaran dan aturan sekolah yang mencakup keduanya termasuk juga konsep dan kebijakan kedisiplinan yang mencakup keduanya seimbang dan terarah bersifat mengatur sesuai model siswa yang mukim atau yang tidak mukim.[13]

Ahmad Yasin sebagai kepala sekolah, Menyampaikan bahwa di SD Islam Arrisalah selain mendisiplin siswa, guru menjadi contoh bagi siswa sehingga mendisplinkan guru menjadi bagian dari usaha mendisplinkan siswa. Ada tahapan evaluasi guru yaitu evaluasi pekanan di internal SD Islam Arrisalah dan evaluasi bersama kyai, evaluasi yg kedua yang paling ditakuti oleh para guru karena langsung ditegur dan tentukan sanksinya oleh kyai.[14]

Seluruh kejadian pelanggaran ketidak disiplinan siswa di sekolah ini mempunyai tahapan-tahapannya diantaranya pada kondisi tertentu guru memanggil anak dan orangtua untuk diadakan pengarahan dan juga tindakan sehingga orang tua dan siswa tersebut sadar dan akan pentingnya kedisiplinan dalam meningkatkan kualitas pribadi siswa. Dan kepala sekolah

[12]http://eostudent.blogspot.co.id/2013/12/, 27 Maret 2017
[13] Mada Indarta, *Wawancara*, ruang guru, *13-02-2019*
[14] Ahmad Yasin, Wawancara, ruang kepala sekolah, 11-02-2019

berperan erat dalam menganalisa, membuat, menerapkan dan mengevaluasi kebijakan dalam meningkatkan kedisiplinan siswa. Maka dari tulisan di atas peneliti ingin membuat penelitian tentang kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di SD Islam Arrisalah Slahung Ponorogo.

B. Rumusan Masalah

1. Apa kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di SD Islam Arrisalah Slahung Ponorogo ?
2. Bagaimana implementasi kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di SD Islam Arrisalah Slahun Ponorogo?
3. Bagaimana evaluasi Kepala Sekolah dalam menerapkan kebijakan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa di SD Islam Arisalah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di SD Islam Arisalah Slahung Ponorogo.
2. Untuk mengetahui implementasi kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di SD Islam Arrisalah Slahung Ponorogo
3. Untuk mengetahui evaluasi kebijakan Kepala Sekolah dalam menerapkan kebijakan untuk meningkatkan kedisiplinan siswa di SD Islam Arisalah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Penelitian bermanfaat untuk menambah khasanah keilmuan bagai pemerhati perkembangan pendidikan khususnya bagi kepala sekolah dalam manajemen sekolah dan kebijakan dalam sekolah dalam peningkatan kedisiplinan, sehingga terbentuklah hasil pendidikan yang taat dengan disiplin

2. Manfaat Praktis

Akan merupakan sumbangan berharga untuk Sekolah Dasar Islam Arrisalah Slahung Ponorogo khusunya untuk kepala sekolah dalam membuat kebijakan guna meningkatkan kedisiplinan siswa dan Guru.

E. Kajian Terdahulu

Selama ini penulis belum menemukan karya tulis yang membahas tentang kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di SD Islam Arrisalah Slahung Ponorogo baik tesis maupun skripsi di IAIN Ponorogo. Di Perguruan Tinggi lain, penulis menemukan beberapa karya ilmiah yang secara terpisah membahas tentang kebijakan peningkatan kedisiplinan siswa. Karya ilmiah tersebut antara lain:

Anas Purwanto, mahasiswa Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008 berjudul *Upaya Sekolah dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa di MTsN Ngemplak Sleman Yogyakarta*, penelitian ini menghasilkan temuan (1) upaya upaya sekolah dalam peningkatan kedisiplinan adalah dengan memberikan kode etika siswa, pemberian sanksi kepada pelanggar peratuan, penanaman kesadaran kedisiplinan, keteladanan dari guru dalam berdisiplin, pemberian angket kesepakatan antara murid dan sekolah. (2) faktor pendukung keberhasilannya kerjasama yang baik antara siswa, wali murid dan pihak sekolah.[15]

[15] © 2008 E-Doc Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.(diakses 19 mei 2018)

Rohmah Binti, mahasiswi STAIN Ponorogo, 2015 dengan judul *Peran kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa melalui tatatertib murid, studi kasus di MI Ma'aif Patihan Wetan Ponorogo*. Hasil penelitian ini adalah (1) peran kepala sekolah sebagai manager sebagai pengontol dan memberikan tugas kepada guru agar kedisiplinan berlangsung dengan baik. (2) hambatannya adalah kurangnya kemauan guru untuk menjadi contoh dan mensosialisasikan kedisiplinan kapada murid di sekolah. Solusi yang ditempuh kepala sekolah adalah dengan mendorong guru untuk mampu menjadi contoh dan mampu mensosialisasikan kepada murid di sekolah.

Norsa Muhammad Fajri, mahasiswa Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016 dengan judul sekripsinya *Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Akhlaq Siswa Kelas X Terhadap Guru PAI di SMAN 1 Kalasan*. Hasil dari penelitian ini adalah (1) melaksanakan sasaran mutu, mengadakan masa orientasi keagamaan, kerohanian siswa (rohis), pengajian kelas dan mentoing. (2) dengan pembiasaan dan mentaati kebijakan kepala sekolah hasilnya akan membentuk akhlaq siswa, hal tersebut dapat dilihat dari kepatuhan siswa terhadap guru, kesadaran siswa dalam beribadah, menciptakan hubungan antara siswa dan guru, mningkatkan kedisiplinan dan kerapian siswa dalam berpakaian. (3) ada faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kebijakan kepala sekolah ini. Pendukungnya adalah adanya fasilitas yang memadai, adanya partisipasi siswa dalam pelaksanaan kebijakan kepala sekolah, adanya kesamaan visi dan misi serta kerjasama yang baik, adanya keteladanan dari guru untuk siswa, adanya hubungan antara pihak sekolah dan wali murid. Adapn faktor penghambatnya adalah respon siswa yang berbeda-beda dalam melaksanakan kebijakan kepala sekolah, faktor keluarga dan perbedaan agama.

Lestari, Farikha Wahyu. 2011 dengan judul skripsi *Upaya Meningkatkan Kedisiplinan Siswa dalam Menaati Tata Tertib Melalui Layanan Penguasaan Konten Dengan Teknik Modelling pada Siswa Kelas*

VII SMP Negeri 11 Semarang Tahun Ajaran 2010/2011. Skripsi, Jurusan Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Hasil penelitian yang diperoleh, tingkat kedisiplinan siswa sebelum mendapatkan layanan penguasaan konten tergolong dalam kategori sedang dengan persentase 66,6% Setelah mendapatkan penguasaan konten meningkat menjadi 77,6% dalam kategori tinggi. Dengan demikian mengalami peningkatan sebesar 11%. Dari perhitungan uji t-test diperoleh t hitung = 10,67 > t tabel = 2,04. Hasil tersebut menunjukkan bahwa layanan penguasaan konten dengan teknik *modelling* dapat meningkatkan kedisiplinan siswa. Simpulan dari penelitian ini adalah kedisiplinan siswa dapat ditingkatkan melalui pemberian layanan penguasaan konten dengan teknik *modelling*. Saran yang diberikan yaitu, pihak sekolah untuk menyediakan sarana yang mendukung pelaksanaan program BK, guru pembimbing untuk menggunakan layanan penguasaan konten dengan teknik *modelling* untuk meningkatkan kedisiplinan siswa

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

   Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami secara mendalam, mencari makna dibalik apa yang dikatakan dan dilakukan oleh subjek dan kominitas yang diteliti, untuk dipaparkan dan dianalisa lebih terperinci, hingga kemudian dapat diambil kesimpulannya.[16]

   Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif karena data yang terkumpul masih bersifat umum, yang perlu untuk dijabarkan dan dijelaskan lebih lajut sehingga data yang ada tidak mungkin diteliti menggunakan metode penelitian kuantitatif yang menggunakan kuesioner atau test dan hasilnya berupa hitungan statistik dan angka-angka.

2. Kehadiran Peneliti

[16] Nusa Putra dan Santi Lisnawati, *Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 57.

Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrumen utama. Dalam hal ini peneliti harus berada di lapangan dalam jangka waktu yang memadai, untuk melakukan pengamatan (observasi), wawancara serta melakukan analisis terhadap dokumen dengan tujuan untuk mengumpulkan data.[17]

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di SD Islam Arrisalah kampus Pondok Modern Arrisalah Gundik Slahung Ponorogo

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari hasil pengumpuan data yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Misalnya data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer tersebut antara lain:

Data tentang penerapan kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di SD Islam Arrisalah Slahung Ponorogo. Data tersebut bersumber dari hasi observasi penerapan kediplinan di SD Islam Arrisalah.

Data tentang kendala yang dihadapi SD Islam Arrisalah dalam melaksanakan kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa. Data tersebut bersumber hasil wawancara dengan kepala sekolah dan guru pelaksana kedisiplinan

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan data yang dilakukan oleh orang lain yang ada kaitannya dengan judul penelitian ini. Dalam hal ini peneliti mengambil data dari buku-buku, internet serta dokumen-dokumen tertulis lainnya yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini.

b. Sumber Data

[17] Ibid

Sumber data dalam penelitian ini adalah para informan antara lain:

1. Ahmad Yasin, S.Pd, sebagai Kepala Sekolah SD Islam Arrisalah Slahung Ponorogo.
2. Mada Indarta, S.Pd, Wakil Kepala Sekolah urusan bidang kurikulum, sebagai Waka Kurikulum yang bertanggung jawab penuh kepada Kepala Sekolah dan sebagai pelaksana tugas dalam menjalankan manajemen pembelajaran di sekolah.
3. Bahar Beniko, S.Pd. Sebagai Ketua Pengasuhan santri (BK) yang bertanggung jawab terhadap kedisiplinan santri dan siswa.
4. Wahibul Ibtida, S.Pd, Sebagai Musyrif pengurus asrama.

5. Tahap-tahap Penelitian

Ada tiga tahapan dalam penelitian ini:

a. Tahap pra lapangan, meliputi penyusunan rencana penelitian, pemilihan lapangan penelitian, mengurus perizinan, penjajakan awal di lapangan, memilih dan memanfaatkan informasi, menyiapkan perlengkapan penelitian yang menyangkut persoalan etika penelitian.
b. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi pemahaman terhadap latar belakang penelitian, persiapan diri memasuki lapangan dan berperan serta dalam mengumpulkan data di lapangan.
c. Tahap analisa data yang meliputi pemaparan data hasil penelitian dan menganalisanya setelah data dipaparkan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa metode diantaranya:

a. Observasi yaitu studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan memperhatikan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.[18]

[18] Ibid, 143.

Dalam penelitian ini metode observasi digunakan untuk mengumpulkan data mengenai kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa.

b. Wawancara yaitu suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu di mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik untuk membicarakan masalah tertentu.[19] Wawancara kualitatif dilakukan bila peneliti bermaksud untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti.

   Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara mendalam untuk mengumpulkan data-data mengenai kendala yang dihadapi Kepala Sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa SD Arrisalah Slahung Ponorogo.

c. Metode dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data mengenai hal-hal atau fakta-fakta yang berupa catatan, dokumen, transkrip, buku surat kabar, majalah dan lain-lain yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti.[20]

   Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data catatan atau gambar (foto) tentang kegiatan kedisiplinan siswa di SD Islam Arrisalah.

7. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data ini peneliti menggunakan analisis induktif, keterangan-keterangan yang bersifat umum diperjelas menjadi pengertian khusus yang terperinci baik pengetahuan yang diperoleh dari lapangan maupun kepustakaan. Dalam bukunya Sugiyono mengatakan bahwa analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.[21] Teknik analisa data tersebut diantaranya:

---

[19] Ibid, 160.
[20] Koentjoroningrat, *Penelitian dalam Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1998), 175.
[21] Ibid.

a. *Data reduction* (reduksi data) berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dengan cara mencari tema dan polanya.
b. *Data display* (penyajian data) setelah data direduksi maka selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data akan peneliti lakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif.
a. *Conclusion drawing/verification*, yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi.

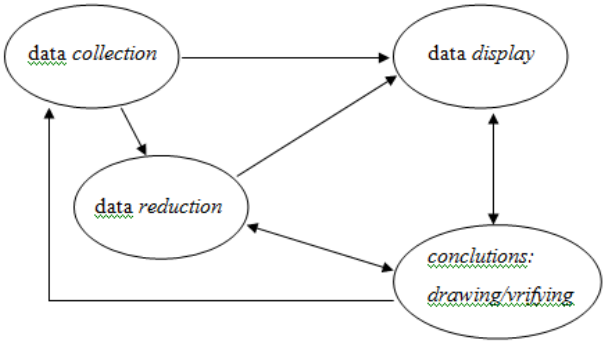

Gambar 1.1

Langkah analisa data model Miles &Huberman

8. Pengecekan Keabsahan

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi, *credibility* (validitas internal), uji *dependability* (reabilitas) data, uji *transferability* (validitas eksternal), dan uji *conformability* (objektifitas).[22] Namun yang utama dalam pengecekan keabsahan ini adalah uji *credibility* atau uji kredibilitas yaitu dengan melakukan:

Perpanjangan pengamatan, yaitu peneliti mendatangi kembali orang yang pernah diwawancarai untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar dapat dipercaya keabsahannya. 2) Meningkatkan ketekunan, yaitu melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan

[22] Ibid, 35.

dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. 3) Trianggulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 4) Diskusi dengan teman sejawat, dalam hal ini peneliti akan berdiskusi dengan guru yang mengajar di SD Islam Arrislah. 5) Membercheck, yaitu pengecekan data yang diperoleh peneliti dengan mencocokkan atau menunjukkan langsung kepada si pemberi data. 6) Analisa kasus negatif yaitu peneliti mencari data yang berbeda atau bertentangan dengan data yang sudah ditemukan, bila sudah tidak ada lagi data yang bertentangan dengan hasil temuannya berarti data hasil temuannya sudah dapat dipercaya.[23]

1. Tahapan Penelitian

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada 3 (tiga) tahapan dan ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah (1) tahap pra-lapangan, yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian. Tahap ini dilakukan bulan Oktober sampai dengan Desember; (2) Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi : memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperanserta sambil mengumpulkan data. Tahap ini dilakukan bulan Desember sampai dengan Januari (3) Tahap analisis data, yang meliputi: analisis selama dan setelah pengumpulan data. Tahap ini dilakukan bulan Mei (4) Tahap penulisan laporan yaitu bulan bulan Juni.

G. Sistematika Pembahasan

[23] http://Zuraida-syahla. blogspot.com/2013/11/uji-validitas-dan-reabilitas.html (diakses 10 Februari 2018).

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang urutan penulisan agar menjadi kesatuan bahasa yang utuh, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang berisi: latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang meliputi: jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, tahapan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan temuan, jadwal penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan kajian teori terdiri dari dua poin. Poin pertama kerangka teori yang meliputi pembahasan tentang kebijakan kepala sekolah dan pembahasan tentang kedisiplinan siswa. Sedangkan poin kedua adalah penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan pningkatan kedisiplinan siswa.

Bab ketiga, merupakan pemaparan tentang gambaran umum penyajian data data yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, tentang tenaga pendidik dan kependidikan, data keberadaan siswa di SD Islam Arrisalah tiga tahun terakhir serta kondisi sarana dan prasarana sekolah.

Bab keempat, kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa berupa tahapan perumusan kebijakan kepala sekolah SD Islam Arrisalah dalam peningkatan kedisiplinan siswa (studi kasus di SD Islam Aisalah Slahung Ponorogo).

Bab kelima, merupakan analisa yang meliputi; analisa tentang pelaksanaan kebijakan kepala sekolah dalam peningkatan kedisiplinan siswa, analisa tentang implikasi dan monitoring kebijakan di SD Islam Arisalah dalam peningkatan kedisplinan siswa,

Bab keenam, analisa tentang evaluasi kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa meliputi penilain dan klarifikasi kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa (studi kasus di SD Islam Arisalah Slahung Ponorogo).

Bab ketujuh merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KEDISIPILINAN SISWA

A. Kebijakan Kepala Sekolah

Sebelum memabahas Kebijakan Kepala Sekolah, peneliti akan memahami tentang "Kebijakan". Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan asas rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara suatu bertindak, pernyataan, cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan.[24]

Tahapan dari siklus kebijakan menurut Wenner Jann dan Kai Wegrich adalah (1) Pengenalan masalah dan seleksi isu (2) Formulasi kebijakan dan pembuatan kebijakan (3) Penerapan kebijakan (4) Evaluasi dan terminasi.[25]

Proses kebijakan menurut Dye adalah *(1) Identification of policy problem (2) Agenda setting (3) Policy formulation (4) Policy legitimation (5) Policy implementation (6) Policy evaluation*.[26]Teori kebijakan menurut Sholichin Abdul Wahab, kebijakan adalah tindakan politik atau serangkaian prinsip, tindakan yang dilakukan oleh sesorang, kelompok atau pemerintah atau aktor terhadap suatu masalah. Menurut Dunn kebijakan publik merupakan sebagai *"the process of producting knowledge of and in policy processes*". Menurut Yoyon Bahtiar Irianto kebijakan dapat diasebut sebagai serangkaian tindakan sebagai suatu arahan untuk mencapai tujuan . hal yang berkaitan dengan kebijakan organisasi merupakan komponen-komponen masukan yang perlu dimanfaatkan dalam usaha memperolah setiap produk atau keluaran. Proses untuk mencapai produk atau keluaran tersebuat

[24] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), 190.
[25]Wenner Jann and Kai Wegrich, *handbook of Public Policy Analysis.* 34
[26]H.A.R Tilaar dan Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 189

senantiasa dilakukan melalui kebijakan. Berdasarkan unsur-unsur tersebut, maka setiap kebijakan akan selalu mengandung sesuatu yang oleh orang banyak diberikan makna yang prinsipil, dan tidak merugikan orang banyak, karena setiap kebijakan selalu berdasar atas peraturan undang-undang.[27]

Kebijakan Pendidikan menurut Devine memilki empat dimensi pokok yaitu dimensi normatif, struktural, konstituentif dan teknis. Dimensi normatif terdiri atas nilai, standar, dan filsafat. Dimensi ini memaksa masyarakat untuk melakukan peningkatan dan perubahan melalui kebijakan pendidikan yang ada. Dimensi tersebut perlu dukungan dari dimensi struktural. Dimensi ini berkaitan dengan ukuran pemerintah (desentralisasi, sentralisasi, federal atau bentuk lain dan satu struktur organisasi, metode dan prosedur yang menegaskan dan mendukung kebijakan bidang pendidikan.[28]

Banyak pakar mengajukan jenis kebijakan publik berdasarkan sudut pandangnya masing-masing. James Anderson.[29] Misalnya, menyampaikan kategori tentang kebijakan publik tersebut sebagai berikut: (a). Kebijakan substansif versus kebijakan prosedural. Kebijakan substantif yakni kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan. (b). Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan re-distributif. Kebijakan distributif. Kebijakan distributis menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori adalah kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan kebijakan re-distributif adalah kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. (c). Kebijakan material versus kebijakan simbolis.

[27]Yoyon Bahtiar Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan*,(Jakarta, PT Grafindo Persada, 2012), 34

[28]Muhammad Munadi dan Barnawi, *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*, (Jakarta, Ar-Ruz Media, 2011), 19

[29]James E. Anderson, *Public Policy Making*, Holt, Rinchard & Winston,(New York, 2013), 27

Kebijakan material adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkrit pada kelompok sasaran. Sedangkan kebijkan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran. (d). Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods).* Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yangbertujuan mengatur pemberian

Proses desain kebijakan menurut Wiliam n Dunn adalah sebagai berikut:

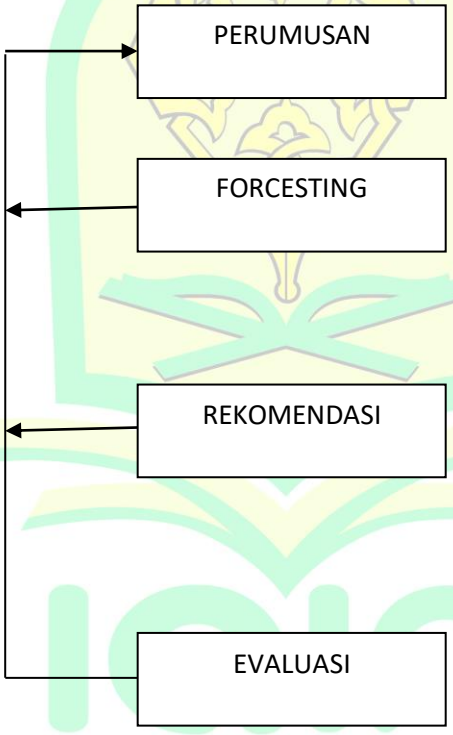

Kebijakan dilihat dari sudut fungsional merupakan sebuah keputusan tunggal baik secara eksplisit atau implisit yang dapat menetapkan suatu perintah menjadi suatu pedoman bagi suatu kelompok sebagai

keputusan di masa depan untuk memulai atau menghambat tindakan atau sebagai pedoman bagi keputusan yang sebelumnya. Di mana kecenderungan dari suatu kebijakan muncul dari dasar wacana yang diakui sebagai arah startegis untuk kebijakan dan diterjemahkan ke dalam kebijakan yang luas yang kemudian diterapkan pada beberapa domain seperti kesehatan, ekonomi, pendidikan. Sehingga di dalam pembuatan keputusan kebijakan idealnya menggabungkan pengetahuan teknis yang canggih dengan realitas sosial dan politik yang kompleks.[30]

Kepala sekolah sebagai *top managers* sekaligus pelaku kebijakan dalam lembaga pendidikan mempunyai wewenang yang luas sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Di mana sesuai dengan PP No 19 tahun 2017 pasal 54 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa, kepala sekolah bukan lagi guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai kepala sekolah, namun jabatan yang memiliki beban kerja sebagai kepala satuan yang sepenuhnya untuk melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan dan dalam keadaan tertentu kepala satuan pendidikan dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan untuk memenuhi kebutuhan guru dalam satuan pendidikan.[31]

Adapun uraian tugas kepala sekolah sebagai berikut: (1) sebagai manajerial kepala sekolah harus memiliki strategi yang mampu mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen dengan efektif dan efisien. Terdapat tiga keterampilan minimal yang harus dimiliki oleh kepala sekolah sebagai manajerial yaitu keterampilan konseptual, keterampilan kemanusiaan, serta keterampilan teknis. (2) sebagai *entrepreneur* kepala sekolah harus mampu memiliki berbagai macam keahlian yang keahliannya dapat diteruskannya kepada orang-orang yang dipimpinnya. (3) sebagai supervisi, kepala sekolah mempunyai tugas untuk mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan. Tugas kepala sekolah dalam

[30]Frank Fischer, et al, *Handbook Analisis Kebijakan Publik Teori, Politik dan Metode,* ter, Imam Baihaqi et al, (Bandung: Nusa Media, 2014), xxi.

[31] PP No 19 Tahun 2017 Pasal 54 ayat 2.

pembelajaran atau pembimbingan untuk memenuhi kebutuhan guru dalam satuan pendidikan.

1. **Fungsi Kebijakan**

Arah sebuah lembaga pendidikan sebagian besarnya adalah pengaruh dari bagaimana kebijakan yang diambil oleh kepala sekolah begitu juga pengaruhnya terhadap kualitas pendidikan. Kepala sekolah mengambil peranan penting dalam kebijakan disekolah dari semua sisi proses pembelajaran di sekolah, begitu juga tingkat keberhasilan sekolah kebijakan kepala sekolah mempunyai peranan yang penting.

Menurut Pongtuluran bahwa fungsi kebijakan diantaranya adalah

a. Pedoman untuk bertindak. Kebijakan pendidikan mempunyai posisi yang sentral dalam menentukan suatu acuan dalam implementasi program pendidikan serta sebagai tuntutan ke mana arah sistem pendidikan akan tertuju dan berjalan.
b. Pembatas perilaku. Hal ini dikarenakan kebijakan pendidikan tidak dapat dilepas dari norma serta aturan dalam setiap tindakan yang diaktualisasikan berkaitan dengan aktivitas pendidikan.
c. Bantuan bagi pengambil keputusan. Kebijakan pendidikan sebagai ujung tombak dalam mengambil keputusan yang tepat dan benar setelah melalui serangkaian proses perumusan oleh para pembuat kebijakan pendidikan.[32]

Dalam hal ini fungsi kebijakan merupakan sangatlah penting untuk menentukan arah dan tujuan pendidikan bahkan sampai kepada tingkatan pembatasan kegiatan dalam sekolah yang dilakukan oleh seluruh waga sekolah.

PONOROGO

2. **Poses Pembuatan Kebijakan**

William N Dunn menjelaskan bahwa proses pembuatan kebijakan merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Di mana dalam proses

[32] Ratna Dewi, "*Kebijakan Pendidikan di tinjau dari Segi Hukum Kebijakan Publik*", *Ilmu Hukum* (2016), 58-70.

pembuatan kebijakan harus melalui tahapan berikut yaitu perumusan masalah, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan atau rekomendasi kebijakan, implementasi kebijakan, penilaian kebijakan.[33]

Perumusan masalah kebijakan berarti memberi arti atau menerjemahkan problema kebijakan secara benar. Dalam konteks ini Dunn mengatakan ada empat fase atau proses yang saling bergantung dalam perumusan masalah yaitu: pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah dan pengendalian masalah. Perumusan masalah diawali dengan pengakuan atau dirasakannya keberadaan situasi masalah. Situasi masalah dapat dilakukan dengan mengenali masalah (pengenalan masalah) dari situasi masalah kemudian dicari masalah. Biasanya yang didapat adanya setumpuk masalah yang saling mengkait. Kumpulan masalah yang saling mengkait namun belum terstruktur tadi disebut meta masalah. Setumpuk masalah tadi dapat dipecahkan secara serentak, namun harus didefinisikan terlebih dahulu mana yang menjadi masalah publik. Hasil pendefinisian dari setumpuk masalah yang belum terstruktur tadi menghasilkan masalah substantif. Dari masalah substantif tadi kemudian dilakukan spesifikasi masalah dan menghasilkan masalah formal sebagai masalah kebijakan. Secara singkat dapat dijelaskan kegiatan pengenalan masalah menghasilkan meta masalah. Kegiatan pendefinisian meta masalah menghasilkan masalah substantif, dan kegiatan spesifikasi masalah substantif menghasilkan masalah formal.[34]

Formulasi kebijakan atau yang disebut juga dengan peramalan yaitu menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa yang akan datang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Langkah ini dapat menguji masa depan yang *plausible*, potensial, dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau yang diusulkan, mengenai

---

[33] Wiliam Dun, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua.* terj.Samodra Wibawa et.al. Yogyakarta: Gadjah Mada University. 2003, 22

[34] Abubakar Basyarahil, "*Kebijakan Publik dalam Perspektif Teori Siklus Kebijakan*". *Publika*, 2 Juli, 2013, 3

kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan dan mengestimasi kelayakan politik (dukungan dan oposisi) dari berbagai pilihan. Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi maslaah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif. Adapun prosedur perumusan kebijakan meliput: identifikasi isu kebijakan, penyusunan agenda kebijakan, membuat proposal kebijakan, pengesahan rumusan kebijakan.[35]

Perumusan masalah kebijakan sangatlah penting, karena sebagian besar waktu yang dihabiskan dalam memformulasikan kebijakan pendidikan tersebut berada pada perumusan ini. Salah dalam perumusan sebuah kebijakan akan berakibat sangat fatal, dan kemungkinan besar kebijakan yang dilakukan juga akan mengalami hambatan dan tantangan berat di lapangan. Kekeliruan dalam merumuskan masalah, berakibat pada langkah-langkah berikutnya, bahkan menjadi kelirunya formulasi kebijakan. Oleh karena itu, perumusan masalah kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan harus hati-hati, cermat, dan teliti. Data-data informasi dan keterangan-keterangan yang didapatkan merupakan masukan dari banyak peserta kebijakan pendidikan, haruslah dapat diakomodasi sedemikian rupa.[36]

Dari masalah-masalah yang dirumuskan, kemudian dipilih masalah dengan prioritas yang paling krusial sampai dengan yang tidak krusial untuk diagendakan. Diruntutnya dari masalah yang krusial sampai yang paling tidak krusial tersebut sangat penting karena tidak mungkin semua masalah diagendakan. Dengan demikian, masalah-masalah yang diagendakan tersebut adalah masalah-masalah yang dapat diselesaikan.

Proposal kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang arahnya adalah menyusun dan mengembangkan alternatif tindakan dalam memecahkan masalah kebijakan. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi: mengenali alternatif permasalahan kebijakan, mendefinisikan dan

[35] H.M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori, Aplikasi , dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada: 2015), 80.

[36] Ibid, 81

merumuskan alternatif pemecahan masalah, mengevaluasi masing-masing alternatif ditinjau dari kemungkinan dapat dilaksanakan atau tidak, dan memilih yang paling tepat untuk memecahkan masalah.

Suatu rumusan kebijakan baru dipandang final setelah disahkan peserta perumusan kebijakan formal. Pengesahan atau legalitas adalah suatu konstitutional alternatif pemecahan maslah terpilih yang selama ini diupayakan. Pengesahan ini penting, agar siapapun yang bermaksud diikat oleh rumusan kebijakan tersebut, akan secara jelas dapat mengenai sasarannya. Rekomendasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang telah diestimasikan melalui peramalan. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastiaan, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuat pembuatan pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administratife bagi implementasi kebijakan.[37]

3. Implementasi Kebijakan

Menurut Nasrun bahwa dalam proses kebijakan hanya ada tiga komponen yang saling berkaitan yaitu: (1) kebijakan itu sendiri, (2) pelaku kebijakan, dan (3) lingkungan. Kebijakan merupakan isi yang menjadi komitmen dari kebijakan, sedangkan pelaku kebijakan disebut juga sebagai *stakeholder*. Adapun yang dimaksud dengan lingkungan

[37] Ibid, 83

adalah keadaan sosial politik, sosial budaya, sosial ekonomi, pertahanan dan keamanan.[38]

Pemantauan (monitoring) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap implementasi kebijakan. Yang mana dalam proses implementasi kebijakan merupakan sebuah proses yang menetukan sekaligus menegangkan. Karena dalam proses ini menjadi sebab akhir dari semua kebijakan yang sudah diambil. Seandainya rumusan kebijakannya sudah dibuat bagus namun tidak ada tindak lanjut berupa impelementasi maka usaha perumusan kebijakan tidak ada artinya. Sehingga pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggungjawab pada setiap tahap kebijakan. Di mana implementasi tidak hanya dilihat dari pendekatan kepatuhan semata, tetapi juga melihat bagaimana meraih hasil-hasil program yang diinginkan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga implementasi menjadi lebih kompleks.[39]

4. Evaluasi Kebijakan

Tahapan ini sangatlah penting dilakukan dalam mengukur dan menilai dari hasil sebuah kebijakan. Manfaat dari adanya evaluasi implementasi kebijakan yaitu:

1) Untuk menggambarkan realitas yang muncul dengan pola-pola sejauh dapat dilakukan.
2) Menjelaskan pola-pola yang ada termasuk berbagai pengaruh yang ada, arah, dan hubungan sebab akibat dari berbagai pengaruh tersebut.
3) Untuk melakukan evaluasi terhadap berbagai aspek proses implementasi pada fase awal program dilaksanakan: bagaimana

[38] Faried Alie .Andi Syamsu Alam. et.al. *Studi Analisa Kebijakan Konsep, Teroi dan Aplikasi Sampai Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah.* Bandung: Refika Aditama. 2012. 88

[39] Ibid, H.M Hasbullah, 91

pencapaian terhadap tujuan yang telah ditetapkan: bagaimana cara menghadapi perbedaan dari berbagai harapan dan tujuan.[40]

Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah.[41] Secara khusus evaluasi implementasi menurut Ripley adalah (a) ditujukan untuk melaksanakan evaluasi terhadap proses (b) menambah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab pada perspektif apa yang terjadi dan perspektif kepatuhan; dan (c) ditujukan untuk melakukan evaluasi aspek-aspek dampak kebijakan yang terjadi dalam jangka pendek.[42]

B. Kedisiplinan Siswa

Kata disiplin berasal dari bahasa latin "*discipulus*" yang berarti pembelajaran. Jadi, disiplin itu sebenarnya difokuskan pada pengajaran. Menurut Ariesandi arti disiplin sesungguhnya adalah proses melatih pikiran dan karakter anak secara bertahap sehingga menjadi seseorang yang memiliki kontrol diri yang berguna bagi masyarakat.[43]Dalam menanamkan kedisiplinan pada siswa, guru sebagai pendidik dan karyawan sebagai tenaga kependidikan harus bertanggung jawab untuk mengarahkan apa yang baik, menjadi tauladan, sabar dan penuh pengertian.

a) Penanaman atau penegakkan kedisiplinan

---

[40] Mada Sutopo. *Buku Pengantar Kuliah Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar.* Yogyakarta: Universitas Yogyakarta. 2005, 28.

[41] Ibid, wiliam N Dun, 29

[42] Ibid, : 32

[43]Ibid, 230-231

Kedisiplinan alat yang ampuh dalam mendidik karakter.Banyak orang sukses karena menegakkan kedisiplinan. Sebaliknya, banyak upaya membangun sesuatu tidak berhasil karena kurang atau tidak disiplin. Banyak agenda yang telah ditetapkan tidak dapat berjalan karena kurang disiplin. Menanamkan prinsip agar peserta didik memiliki pendirian yang kokoh merupakan bagian yang sangat penting dari strategi menegakkan disiplin. Penegakan disiplin antara lain dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut:

1) Peningkatan motivasi.

   Motivasi merupakan latar belakang yang menggerakkan atau mendorong orang untuk melakukan sesuatu.Ada dua jenis motivasi, yaitu yang pertama motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar diri kita.Kedua motivasi instrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri kita. Dalam menegakkan disiplin, mungkin berawal berdasarkan motivasi ekstrinsik.

   Orang melakukan sesuatu karena paksaan, pengaruh orang lain, atau karena keinginan tertentu. Akan tetapi setelah berproses, orang tersebut dapat saja berubah ke arah motivasi intrinsik. Setelah merasakan bahwa dengan menerapkan disiplin memiliki dampak positif bagi dirinya kemudian orang tersebut melakukan sesuatu dilandasi dengan kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Idealnya menegakkan disiplin itu sebaiknya dilandasi oleh sebuah kesadaran.

2) Pendidikan dan latihan.

   Pendidikan dan latihan merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk dan menempa disiplin. Pendidikan dan latihan merupakan suatu proses yang di dalamnya ada beberapa aturan atau prosedur yang harus diikuti oleh peserta didik. Misalnya, gerakan-gerakan latihan, mematuhi atau mentaati ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan, mendidik orang untuk membiasakan hidup dalam kelompok, menumbuhkan rasa setia kawan, kerja sama yang erat dan sebagainya. Peraturan-peraturan tersebut merupakan faktor-faktor penting dalam

suksesnya mencapai tujuan tertentu. Dan dalam kehidupansehari-hari nilai-nilai karakter tersebut juga sangat penting.

3) Kepemimpinan

Kualitas kepemimpinan dari seorang pemimpin, guru, atau orang tua terhadap anggota, peserta didik ataupun anaknya turut menentukan berhasil atau tidaknya dalam pembinaan disiplin. Karena pemimpin merupakan panutan, maka faktor keteladanan juga sangat berpengaruh dalam pembinaan disiplin bagi yang dipimpinnya.

4) Penegakan aturan

Penegakan disiplin biasanya dikaitkan penerapan aturan (*rule enforcement*). Idealnya dalam menegakkan aturan hendaknya diarahkan pada "takut pada aturan bukan takut pada orang". Orang melakukan sesuatu karena taat pada aturan bukan karena taat pada orang yang memerintah. Jika hal ini tumbuh menjadi suatu kesadaran maka menciptakan kondisi yang nyaman dan aman. Pada dasarnya penegakan disiplin adalah mendidik agar seseorang taat pada aturan dan tidak melanggar larangan yang dilandasi oleh sebuah kesadaran.

5) Penerapan *reward and punishment*

Reward and punishment atau penghargaan dan hukuman merupakan dua kesatuan yang tidak terpisahkan. Jika penerapannya secara terpisah maka tidak akan berjalan efektif, terutama dalam rangka penegakan disiplin.[44]

b) Membangun Tradisi Disiplin yang Kuat

Untuk membangun tradisi disiplin yang baik, ada beberapa halyang perlu dilakukan, diantaranya adalah:

1. Mengingat manfaat dan Kerugiannya. Selalu mengingat manfaat besar disiplin akan mendorong seseorang untuk disiplin. Sebagai seorang guru dan murid, disiplin manfaatnya sangat besar, antara lain pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan baik.

[44]M. Furqon Hidayatullah, *Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa*, (Surakarta: Yuma Pressindo, 2010), 45-49.

2. Mengingat cita-cita. Cita-cita yang besar selalu membutuhkan kerja keras, semangat pantang menyerah, dan prinsip maju tanpa mengenal mundur. Sekali maju, sebesar apa pun halangan dan rintangan yang menghadang, harus dihadapi dengan sikap kesatria, penuh keberanian. Namun, untuk menggapai semua itu perlu kedisiplinan. Cita-cita besar tidak akan terwujud kalau seseorang tidak disiplin melakukan pekerjaan yang berpengaruh besar dalam hidupnya jangka panjang. Sebelum mendisiplinkan muridnya, seorang guru harus disiplin terlebih dahulu, sehingga murid-muridnya segan dan mengikuti perintahnya.
3. Memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab besar yang ada di pundak guru harus dilaksanakan sebagai amanat dari negara, masyarakat, dan nurani sendiri. Tanggung jawab mendidik dan mempersiapkan masa depan anak bangsa membutuhkan keseriusan dan kerja keras seorang guru dan serang siswa harus belajar dengan rajin untuk masa depan.
4. Pandai mengatur waktu. Disiplin melaksanakan kegiatan membutuhkan kemampuan mengatur waktu dengan baik. Dari manajemen waktu tersebut bisa diketahui mana yang menjadi prioritas. Istilahnya, mana yang masuk kategori pekerjaan wajib (harus dilaksanakan), sunah (baik dilakukan), makruh (banyak negatifnya), dan haram (larangan)dilakukan.
5. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hal-hal yang tidak manfaat, misalnya begadang malam, nonton televisi sampai malam, ngobrol larut malam, dan sejenisnya, seharusnya ditinggalkan. Seorang guru harus memberikan contoh yang baik dan konstruktif kepada anak didik danmasyarakatnya.[45]

Membangun tradisi disiplin pada anak dilakukan mulai dari kecil karena perilaku dan sikap disiplin seseorang terbentuk tidak secara otomatis, namun melalui proses yang panjang dan tidak dibentuk dalam waktu yang singkat. Disiplin dalam Islam sangat dianjurkan untuk selalu

[45]Jamal Ma‟mur Asmani, *Tips Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif, Inovatif,* (Yogyakarta: DIVA Press, 2010), 88-93.

diaktualisasikan dalam kehidupan seharihari. Anjuran ini secara implisit tertuang di dalam Al-Qur-an surat *Al-Ashr* ayat 1-3:

وَٱلْعَصْرِ{1}إِنَّٱلْإِنْسَانَ لَفِى خُسْرٍ{2} إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوْا الصَّالِحَاتِ وَتَوَا صَوْبِالْحَقِّ وَتَوَا صَوْبِالصّبْرِ{3}

Demi masa. (1) Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan kerugian,(2) kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh dan nasehat-menasehati dalam kebenaran dan nasehat-menasehati supaya menetapi kebenaran.(3) (Q.S. Al-Ashr 1-3).[46]

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah menyuruh kepada manusia supaya dapat memanfaatkan waktu dengan baik, yaitu tidak menyia-nyiakan waktu yang tersedia dengan melakukan perbuatan yang tidak bermanfaat. Ini menunjukkan bahwa Allah menyuruh manusia untuk berlaku disiplin dalam menggunakan waktu yang tersedia. Namun, perintah disiplin tersebut tidak terbatas dalam aspek waktu saja, akan tetapi disiplin yang diaktualisasikan dalam segala aspek kehidupan.

c) Macam-macam Disiplin

Di dalam bukunya Jamal Ma"mur Asmani yang berjudul "tipsmenjadi guru inspiratif, kreatif, inovatif", macam-macam disiplin dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Disiplin waktu. Disiplin waktu menjadikan sorotan utama bagi seorang guru dan murid. Waktu masuk sekolah biasanya menjadi parameter utama kedisiplinan guru dan murid. Kalau guru dan murid masuk sebelum bel dibunyikan, berarti disebut orang yang disiplin. Kalau masuk pas dibunyikan, bisa dikatakan kurang disiplin, dan kalau masuk

[46]Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur"an,*Al-Qur"an dan Terjemahnya...,* 1099.

setelah bel dibunyikan, maka dinilai tidak disiplin, menyalahi aturan sekolah yang telah ditentukan. Karena itu, jangan menyepelekan disiplin waktu ini, usahakan tepat waktu ketika datang pada jam masuk sekolah. Begitu juga dengan jam mengajar, kapan masuk dan kapan keluar, harus sesuai dengan alokasi waktu yang ditentukan agar tidak mengganggu jam guru lain.

2. Disiplin Menegakkan Aturan. Disiplin menegakkan aturan sangat berpengaruh terhadap kewibawaan guru. Model pemberian sanksi yang diskriminatif harus ditinggalkan. Murid sekarang yang ini cerdas dan kritis, sehingga kalau diperlakukan semena-mena dan pilih kasih, mereka akan memakai cara mereka sendiri untuk menjatuhkan harga diri guru. Selain itu, pilih kasih dalam memberikan sanksi sangat dibenci dalam agama. Keadilan harus ditegakkan dalam keadaan apa pun. Karena, keadilan itulah yang akan mengantarkan kehidupan ke arah kemajuan, kebahagiaan, dan kedamaian.
3. Disiplin Sikap. Disiplin mengontrol perbuatan diri sendiri menjadi *starting point* untuk menata perilaku orang lain. Misalnya, disiplin tidak tergesa-gesa, dan gegabah dalam bertindak. Disiplin dalam sikap ini membutuhkan latihan dan perjuangan, karena, setiap saat banyak hal yang menggoda kita untuk melanggarnya. Dalam melaksanakan disiplin sikap ini, tidak boleh mudah tersinggung dan cepat menghakimi seseorang hanya karena persoalan sepele. Selain itu, juga harus mempunyai keyakinan kuat bahwa tidak ada yang bisa menjatuhkan diri sendiri kecuali orang tersebut. Kalau disiplin memegang prinsip dan perilaku dalam kehidupan ini, niscaya kesuksesan akan menghampiri.

Menurut Ali Imron disiplin dibedakan menjadi tiga macam. *Pertama*, disiplin yang dibangun berdasarkan konsep *otoritarian.* Menurut konsep ini, peserta didik di sekolah dikatakan mempunyai disiplin tinggi apabila peserta didik ingin duduk tenang sambil memperhatikan uraian guru ketika sedang mengajar. *Kedua*, disiplin yang dibangun berdasarkan konsep

permissive. Menurut konsep ini, peserta didik seharusnya diberi kebebasan seluas-luasnya di dalam kelas dan sekolah. Peraturan-peraturan di sekolah tidak selalu mengikat perbuatan peserta didik yang menurutnya baik. *Ketiga,*disiplin yang dibangun berdasarkan konsep kebebasan yang terkendali atau kebebasan yang bertanggung jawab.

Disiplin demikian, memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk berbuat apa saja, tetapi konsekuensi dari perbuatan itu, haruslah ia tanggung. Menurut konsep kebebasan terkendali ini, peserta didik memang diberi kebebasan, asal yang bersangkutan tidak menyalah gunakan kebebasan yang diberikan, sebab tidak ada kebebasan mutlak di dunia ini dan ada batasan-batasan tertentu dalam kehidupan bermasyarakat ataupun di lingkungan sekolah.

a) Pembinaan Disiplin Peserta didik

Penciptaan suasana kondusif dengan peraturan-peraturan sekolah dapat menumbuhkan sikap disiplin, serta pembinaan disiplin akan lebih mudah. Dalam mempelajari pembinaan disiplin peserta didik, kita dapat menganalisis: disiplin kelas, tahapan untuk membantu mengembangkan disiplin yang baik di kelas, penanggulangan pelanggaran disiplin, membentuk disiplin sekolah.

1) Disiplin Kelas

Disiplin kelas adalah keadaan tertib dalam suatu kelas yang di dalamnya tergabung guru dan siswa taat kepada tata tertib yang telak ditetapkan. Dengan disiplin para siswa bersedia untuk tunduk dan mengikuti peraturan tertentu dan menjauhi larangan tertentu. Kesediaan semacam ini harus dipelajari dan harus secara sabar diterima dalam rangka memelihara kepentingan bersama atau memelihara kepentingan bersama atau memelihara kelancaran tugas-tugas sekolah. Satu keuntungan lain dari adanya disiplin adalah siswa belajar hidup dengan pembiasaan yang baik, positif, dan bermanfaat

bagi dirinya dan lingkungannya. Pengelolaan kelas yang baik akan menciptakan disiplin kelas yang baik. Kelas dinyatakan disiplin apabila setiap siswanya patuh pada aturan main/ tata tertib yang ada, sehingga dapat terlibat secara optimal dalam kegiatan belajar.

2) Tahapan pengembangkan disiplin yang baik di kelas

Ada beberapa langkah untuk membantu mengembangkan disiplin yang baik di kelas, yaitu sebagai berikut.

a. Perencanaan

Perencanaan ini meliputi membuat aturan dan prosedur, dan menentukan konsekuen untuk aturan yang dilanggar.

b. Mengajar siswa bagaimana mengikuti aturan

Pekerjaan ini dimulai pada hari pertama masuk kelas. Dalam rangkaian sistem pengelolaan kelas yang sukses, guru harus mempertahankan disiplin dan komunikasi yang baik. Salah satu cara yang terbaik adalah mencegah masalah dari semua kejadian.

c. Merespon tepat dan konstruktif masalah

Contoh, apa yang guru lakukan ketika siswa menantang guru secara terbuka di depan kelas, ketika seorang siswa menanyakan guru bagaimana menyelesaikan masalah yang sulit, ketika guru menangkap seseorang yang menyontek ketika, dan ketika seseorang siswa hilang dan tidak mau berpartisipasi. Hal seperti inilah guru harus dengan segera merespon secara tepat dan konstruktif, agar masalahnya bisa terselesaikan dengan baik.

3) Penanggulangan Pelanggaran Disiplin

Cara-cara penanggulangan pelanggaran disiplin dilaksanakan secara bertahap dengan tetap memperhatikan jenis gangguan yang ada dan siapa pelakunya, apakah dilakukan oleh individu atau kelompok. Langkah tersebut mulai dari tahapan pencegahan sampai pada tahap penyembuhan, dengan tetap bertumpu penekanan substansinya bukan pada pribadi peserta didik. Disamping itu juga harus tetap menjaga perasaan kecintaan terhadap peserta didik bukan karena rasa benci atau emosional. Berikut ini dikemukakan tiga jenis teknik pembinaan disiplin kelas, yaitu:

a. Teknik *inner control*

Teknik ini sangat disarankan untuk digunakan guru-guru dalam membina disiplin peserta didiknya. Teknik menumbuhkan kepekaan/penyadaran akan tata tertib pada akhirnya disiplin bisa tumbuh dan berkembang dari dalam diri peserta didik itu sendiri (*self discipline*). Dengan kata lain peserta didik diharapkan dapat mengendalikan dirinya sendiri.

b. Teknik *external control*

Teknik *external control* yaitu mengendalikan diri dari luar berupa bimbingan dan penyuluhan. Teknik ini dalammenumbuhkan disiplin cenderung melakukan pengawasan (yang kadang perlu diperketat dan kalau perlu menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran).

c. Teknik *cooperative control*

Dengan teknik ini, pembinaan disiplin kelas dilakukan dengan bekerja sama guru dengan peserta didik dalam mengendalikan situasi kelas ke arah terwujudnya tujuan kelas yang bersangkutan. Dimana guru dengan peserta didik saling

mengontrol satu sama lain terhadap pelanggaran tata tertib. Yang perlu diperhatikan oleh guru dalam proses pembinaan disiplin kelas adalah pembedaan-pembedaan individual peserta didik dalam kesanggupan mengadakan mawas diri (introspeksi diri) dan pengendalian dirinya (*self control*). Karena itu teknik *cooperative control* sangat dianjurkan untuk menetralisir teknik *inner control* (yang menuntut kedewasaan) *eksternal control* (yang menganggap peserta didik belum dewasa).

4) Membentuk Disiplin Sekolah

Sekolah yang tertib, aman dan teratur merupakan persyaratan agar siswa dapat belajar secara optimal. Kondisi semacam ini bisa terjadi jika disiplin di sekolah berjalan dengan baik. Kedisiplinan peserta didik dapat ditumbuhkan jika iklim sekolah menunjukkan kedisiplinan. Siswa baru akan segera menyesuaikan diri dengan situasi di sekolah. Jika situasi sekolah disiplin, *siswa* akan ikut disiplin.[47]

b) Indikator Kedisiplinan Peserta didik

Kedisiplinan akan terjadi yaitu dengan upaya :

1. Masuk sekolah tepat waktu pada jam yang telah ditentukan oleh peraturan di sekolah.
2. Mengakhiri kegiatan belajar dan pulang sesuai jadwal yang ditentukan.
3. Menggunakan kelengkapan seragam sekolah sesuai peraturan.
4. Menjaga kerapian dan kebersihan pakaian sesuai dengan peraturan sekolah.

[47]Eka Prihatin, *Menejemen Peserta Didik* (Bandung: Alfabeta, 2011), 93-97.

5. Apabila berhalangan hadir ke sekolah (tidak masuk sekolah), maka harus menyertakan surat pemberitahuan ke sekolah.[48]
6. Mengikuti keseluruhan proses pembelajaran dengan baik dan aktif.
7. Mengikuti dan melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang di tentukan di sekolahan.
8. Mengerjakan tugas yang diberikan guru.
9. Melaksanakan tugas piket kelas sesuai jadwal yang ditentukan.
10. Mengatur waktu belajar.[49]

Dalam penetapan indikator sangatlah perlu karena begitu penting penanaman jiwa kedisiplinan di dalam peserta didik agar siswa terbiasa berdisiplin dan sekolahlah sebagai wadah dalam pembiasaan kedisiplinan tersebut.

PONOROGO

[48]Agus Wibowo, *Pendidikan Karakter, Strategi membagun Karakter Bangsa Berperadapan*, (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 85-86.

[49]Sulistyorini, *Menejemen Pendidikan Islam Konsep, Strategi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 109.

BAB III
SEKOLAH DASAR ISLAM ARRISALAH SLAHUNG PONOROGO

A. Letak geografis dan Sejarah Berdirinya SD Islam Arrisalah

Sekolah Dasar Islam Arrisalah Slahung Ponorogo adalah lembaga pendidikan yang terletak di Desa Gundik Kecamatab Slahung Kabupaten Ponorogo (jurusan pacitan kurang lebih 15 KM) arah selatan dari kota Ponorogo. Sekolah Dasar Islam Arrisalah berdiri diatas tanah seluas 2,5 ha dari 12,5 ha luas kampus Pondok Modern Arrisalah dengan batas batsa : sebelah timur Desa Carabak, sebelah barat Desa Nailan dan sealatan berbatasan dengan Desa Gundik.

Pondok modern Arrisalah dirintis oleh Drs. KH. Muhammad Ma'shum Yusuf Bin Taslim semenjak tahun 1982 dari nol, setelah tamat KMI dan IPD Gontor dan membantu mengajar di Pondok tersebut selama 20 tahun. Diresmikan oleh Guru Beliau KH. Imam Zarkasyi (Pendiri dan Direktur KMI Pondok Modern Gontor) pada 26 Februari 1985, dengan nama "*Madinatul Thullab*" (Kota Santri), kemudian berkembang lalu berubah namanya menjadi Pondok Modern Arrisalah Program Internasional.

Sekolah Dasar Islam Arrisalah juga dirintis oleh K.H Drs, Muhammad ma'shum Yusuf bin Kyai Taslim pada tahun 1993 yang awalnya diberi nama TKA/TPA Arrisalah dengan santri kurang lebih berjumlah 200 anak terdiri dari 125 santriwan dan 75 santriwati yang berasala dari daerah sekitar Pondok Arrisalah. Tahun 1994 Arrisalah membuka santri mukim, datang 3 santri dan santriwati dan menjadi santri pertama di Kulliyatul Mubtadiin Al-Islamiyah (KMI) Arrisalah. Mereka datang dari sumedang, Jakarta, Purwokerto dan Bekasi. Sebelum lembaga pendidikan ini diresmikan pelaksanaan pendidikan formal dilaksanakan di SDN Gundik dan pendidikan agama dilaksanakan didalam asrama Pondok

Modern Arrisalah, saat itu semua santri kecil wajib bermukim di asrama Pondok Modern Arrisalah.

Semakin hari jumlah santri semakin bertambah, hingga pada tahun 1997 resmi didirikan Kulliyatul Mubtadiin Al-Islamiyah (KMI) Arrisalah oleh pimpinan pondok modern Arrialah Drs, K.H Muhammad Ma'shum Yusuf, meskipun sudah berdiri sekolah sendiri namun untuk pelaksanaan ujian negara tetap bergabung dengan SDN Gundik.

Sejak tanggal 17 Juli 2001 Kulliyatul Mubtadiin Al-Islamiyah mendapat izin dari pemerintah (Dinas Pendidikan) untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana mestinya sebuah sekolah sehingga sudah bisa melaksanakan ujian sekolah dan ujian negara dengan nama Sekolah Dasar Islam Arrisalah, sejak saat itu sampai sekarang lebih dikenal dengan SDIA (Sekolah Dasar Islam Arrisalah)

Pendidikan yang dilaksanakan tercakup dalam Tri pusat Pendidikan yang meliputi pendidikan rumah (asrama), Pendidikan sekolah (dikelas), dan pendidikan masyarakat (lingkungan pesantren). Proses belajar mengajar di sekolah ini mengacu pada kurikulum nasional yaitu Kurikulum 2016 (KTSP) dan kurikulum 2013 juga ditambah dengan kurikulum lokal (kurikulum pesantren)

B. Visi Misi dan Tujuan Sekolah SD Islam Arrisalah

Visi : "Teladan dalam akhlaqul karimah, unggul dalam prestasi"

Indikator Visi Sekolah :

1. Terwujudnya peserta didik yang berakhlaqul karimah
2. Terciptanya peserta didik yang berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik
3. Terciptanya lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan
4. Tercapainya ketuntasan minimal untuk semua mata pealajaran
5. Terselenggaranya kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien
6. Tersedianya sarana dan prasarana yang representatif

7. Terwujudnya tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap pendidikan
8. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat dan organisasi

Misi sekolah :

1. Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran Islam sehingga menjadi pedoman dalam berprilaku
2. Menggali dan mengembangkan potensi peserta didik berdasakan nilai-nilai Islam
3. Menubuhkan semangat berkreasi, berkompetisi, dan berprestasi kepada seluruh warga sekolah
4. Menegakkan disiplin, keamanan, kebersihan, keindahan, keserasian dan kerindangan
5. Mengefektifkan kegiatan pembelajaran dan bimbingan
6. Menciptakan suasana pembelajaran yang kreatif, inovatif dan Islami
7. Menerapkan manajemen sekolah yang partisipatif dan terbuka
8. Mengembangkan sekolah dengan wawasan lingkungan
9. Mengantarkan anak menuju manusia baru yang cerdas dalam pemikiran, ketrampilan dalam tindakan dan berakhlakul karimah.
10. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan
11. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat.

Tujuan Sekolah :

"Meletakkan dasar kecerdasan, pemikiran, kepribadian, akhlak mulia serta ketrampilan untuk hidup dan mempersiapkan pendidikan lebih lanjut."

1. Terwujudnya pengembangan kurikulum yang adaptif dan proaktif.
2. Terwujudnya poses pembelajaran efektif dan efisien
3. Terwujudnya lulusan yang cerdas dan kompetitif

PONOROGO

4. Terwujudnya SDM yang memiliki kemampuan dan kesanggupan kerja yang amanah
5. Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan
6. Terwujudnya menejemen sekolah yang unggul
7. Terwujudnya penggalangan biaya pendidikan yang memadai
8. Terwujudnya standar penilaian prestasi akademik dan non akademik.

C. Profil Sekolah

1. Nama Sekolah : Sekolah Dasar Islam Arrisalah
2. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 102051102001
3. NPSN : 20549638
4. NIS : 100410
5. Nama Kepala Sekolah : Ahmad Yasin, S.Pd
6. Tanggal Pendirian : 17 Juli 2001
7. Jenjang Akreditasi : Terakreditas B
8. Status Sekolah : Swasta
9. Kelompok sekolah : Imbas
10. Nama Yayasan :Yayasan Pondok Modern Arrisalah Program Internasional
11. Alamat Yayasan : Dukuh Bakalan Desa Gundik Kecamatan Slahung Kab. Ponorogo Telp (0352) 371460
12. Kegiatan Belajar Mengajar : Pagi
13. Berdiri sejak : Tahun 2001

14. Jumlah Siswa : 425 siswa

15. Jumlah Rombel : 14

16. Jumlah Guru : 19 orang

17. Jumlah Tenaga Kependidikan : 2 orang

18. Jarak kecamatan : 5 KM

19. Jarak ke Kab./Kota : 15 KM

20. Terletak tanah : Milik sendiri/Hak pakai

21. Alamat Sekolah :

a. Jalan : Dukuh Bakalan

b. Desa/Kelurahan : Gundik

c. Kecamatan : Slahung

d. Kabupaten : Ponorogo

e. Provinsi : Jawa Timur

f. Kode Pos : 63463

g. No. Telp : (0352) 371006

No. Fax : (0352) 371460

D. Keadaan Guru dan Karyawan

No	Status Pegawai	Kepala	Guru	Karyawan	Jumlah
	Yayasan	1	19	4	24

Jumlah	1	19	4	24

E. Lata Belakang Pendidikan Guru dan Karyawan

S3	S2	S1	SLTA	Lainnya	Jumlah
-	1	17	3	3	24

F. Keadaan Siswa Dalam 3 Tahun Terakhir

KELAS	Tahun Pelajaran 2016/2017			Tahun Pelajaran 2017/2018			Tahun Pelajaran 2018/2019		
	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML
Kelas 1	42	41	83	44	24	66	48	34	82
Kelas 2	27	37	64	29	42	71	38	24	62
Kelas 3	33	26	59	40	39	79	30	42	72
Kelas 4	28	37	65	29	37	66	41	41	82

PONOROGO

Kelas 5	21	21	42	31	27	58	32	37	69
Kelas 6	20	25	45	29	37	66	31	27	58
Jumlah	**171**	**187**	**358**	**202**	**206**	**308**	**220**	**205**	**425**

G. Jumlah Rombel Dalam 3 Tahun Terakhir

NO	KELAS	Tahun Pelajaran		
		2016/2017	2017/2018	2018/2019
1	Kelas 1	3	2	3
2	Kelas 2	2	2	2
3	Kelas 3	2	3	2
4	Kelas 4	2	2	3
5	Kelas 5	2	2	2
6	Kelas 6	2	2	2
	Jumlah	**13**	**13**	**14**

H. Data Ruang

No	Jenis Ruang	Jumlah	Kondisi			
			Baik	Rusak		
				Berat	Sedang	Ringan
1	Ruang Kelas	20	15	-	5	-
2	Ruang Guru	1	1	-	-	-
3	Ruang KS	1	1	-	-	-
4	Ruang Perpus	1	1	-	-	-
5	Ruang TU	1	1	-	-	-
6	Ruang Computer	1	1	-	-	-
7	Ruang Lab	1	1	-	-	-
8	Gudang	1	1	-	-	-
9	Masjid	1	1	-	-	-
10	Kamar Mandi/wc	10	4	-	3	3

I. Susunan Anggota Komite Sekolah

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	Ahmad Yasin, S.Pd.	Penanggung Jawab	Kepala Sekolah

2	Rudianto, S.Pd.	Ketua I	Wali murid
3	Suharji, S.Ag	Ketua II	Sekretaris Yayasan
4	Udan Wikarya	Sekretaris	Wali Murid
5	Nyaimun	Bendahara	Wali Murid
6	Agus Santosa	Anggota	Wali Murid
7	Dian Abdullah	Anggota	Wali Murid
8	Mada Indarta, S,Pd,	Anggota	Guru SDI Arrisalah
9	Daryanti, S. Pd	Anggota	Guru SDI Arrisalah
10	Ika Rani, S.Pd.I	Anggota	Guru SDI Arrisalah

PONOROGO

BAB IV
KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN SISWA

A. Perumusan Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa

NO	Tahapan Kebijakan	Kebijakan	Teknik Pengumpulan Data	Data
1	Identifikasi dan rencana Kebijakan	Latar belakang untuk meningkatkan kedisiplinan di lingkungan SD Islam Arisalah	Wawanacara dengan Kepala Sekolah (Ahmad Yasin, S.Pd)	Tanggung jawab lembaga dengan amanah yang diberikan wali santri akan pendidikan santri. Karena kita mempunyai dua model santri/siswa yaitu santri yang mukim dan yang tidak mukim. Kita ingin mempertahankan santrri mukim. Karena sebenarnya sebelum kita buka santri yang pulang pergi dulu semua wajib mukim, kaena banyaknya pemintaan masyarakat sekitar untuk menerima santri yang tidak mukim

				akhirnya dibukalah pogram itu.[50]
2	Formulasi kebijakan	Membangun tradisi atau pembiasaan kedisiplinan di SD Islam Arrisalah	Wawancara dengan Kepala Sekolah (Ahmad Yasin, S.Pd)	Santri/siswa akan menyesuaikan dan mencontoh guru sebagai figur.[51] Mendisiplin siswa sesuai peraturan yang telah ditetapkan yaitu tindakan peningkatan kedisiplinan secara langsung ataupun dengan peringatan dan pembiasaan kegiatan kedisiplinan di sekolah.
3	Rekomendasi kebijakan	Latar belakang Pembinaan displin peserta didik	Wawancara dengan Kepala Sekolah (Ahmad Yasin, S.Pd)	Menciptakan forum dan momen untuk penguatan kedisiplinan siswa yaitu pada saat 15 menit sebelum masuk kelas, dikelas saat pembelajaan dan setelah sholat dzuhur berjamaah
3	Pengesahan kebijakan		Wawancara dengan Kepala Sekolah (Ahmad	Disetiap awal tahun kita selalu memulai dengan rapat musyawarah besar yang dihadiri oleh

[50] Ahmad Yasin, *Wawancara*, ruang kepala sekolah, 11-02-2019
[51] Ahmad Yasin, *Wawancara*, ruang kepala sekolah, 11-02-2019

			Yasin, S.Pd)	diektur dan tim pendidikan lembaga, kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan untuk penguatan dan penentuan agenda dan program-program yang akan kita jalankan selama satu tahun kedepan. Selain kita mempunyai agenda-agenda musyawarah khusus. Di musyawah inilah kebijakan kita rumuskan dan disahkan bersama.

B. Tahapan Perumusan Kebijakan

Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui kebijakan kepala sekolah dalam meningkatakan kedisiplinan siswa dari proses dan latar belakang kebijakan yang akan diambil dan dijalankan oleh kepala sekolah. William N Dunn menjelaskan bahwa proses pembuatan kebijakan merupakan serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan di dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Di mana dalam proses pembuatan kebijakan harus melalui tahapan berikut yaitu perumusan masalah, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan atau rekomendasi kebijakan, implementasi kebijakan, penilaian kebijakan.[52]Dari hasil wawancara peneliti dengan Ahmad Yasin, S.Pd selaku kepala sekolah SD Islam Arrisalah, “dasar dalam

[52] Wiliam Dun, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua.* terj.Samodra Wibawa et.al. Yogyakarta: Gadjah Mada University. 2003. 22

dalam hal peningkatan kedisiplinan adalah karena SD Islam Arrisalah ini berada dilingkungan pesantren dan kita mempunyai 2 model santri (siswa) yaitu yang mukim dan tidak mukim sehingga haruslah dibuatkan 2 aturan dan tambahan atura untuk mereka, yang kedua kebijakan tentang penerapan adab dan pembiasaan kedisiplinan yang dimulai dari gurunya karena siswa selalu mengikuti pola gurunya, yang ketiga tentang pembinaan kedisplinan"

Menurut Ahmad Yasin, S.Pd "awal berdirinya SD Islam Arrisalah ini santri wajib mukim dan tidak menerima santri yang pulang pergi, karena permintaan masyarakat lingkungan sekitar untuk membuka santri yang pulang pergi maka dibukalah program itu" berangkat dari hal tersebut maka SD Islam arrisalah telah mengambil kebijakan sebagai respon dari adanya masalah. Berangakat dari karena permintaan masyarakat dan juga telah dizinkan oleh kyai untuk membuat program untuk santri yang tidak mukim dan ini menjadi awal untuk merumuskan kebijakan di SD Islam Arrisalah.

Perumusan masalah kebijakan berarti memberi arti atau menerjemahkan problema kebijakan secara benar. Dalam konteks ini Dunn mengatakan ada empat fase atau proses yang saling bergantung dalam perumusan masalah yaitu: pencarian masalah, pendefinisian masalah, spesifikasi masalah dan pengendalian masalah. Perumusan masalah diawali dengan pengakuan atau dirasakannya keberadaan situasi masalah. Situasi masalah dapat dilakukan dengan menemu kenali masalah (pengenalan masalah) dari situasi masalah kemudian dicari masalah. Biasanya yang didapat adanya setumpuk masalah yang saling mengkait. Kumpulan masalah yang saling mengkait namun belum terstruktur tadi disebut meta masalah. Setumpuk masalah tadi dapat dipecahkan secara serentak, namun harus didefinisikan terlebih dahulu mana yang menjadi masalah publik. Hasil pendefinisian dari setumpuk masalah yang belum terstruktur tadi menghasilkan masalah substantif. Dari masalah substantif tadi kemudian dilakukan spesifikasi masalah dan menghasilkan masalah formal sebagai masalah kebijakan. Secara singkat dapat dijelaskan kegiatan pengenalan masalah menghasilkan meta masalah. Kegiatan pendefinisian meta masalah

menghasilkan masalah substantif, dan kegiatan spesifikasi masalah substantif menghasilkan masalah formal.[53]

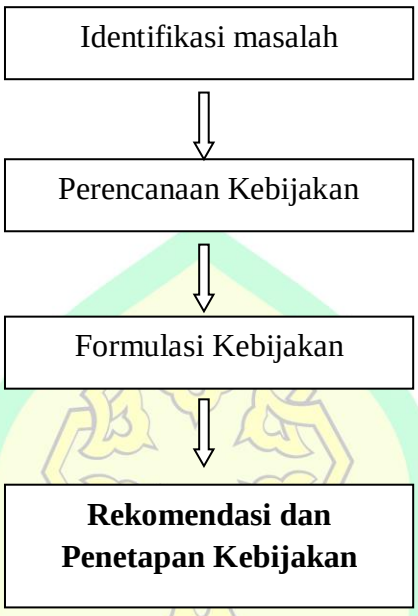

Identifikasi kebijakan yang diterapkan di SD Islam Arrisalah diantaranya adalah (1) karena seringnya beberapa guru yang terlambat kedatangannya dikelas dan untuk mengantisipasi bertambahnya guru yang terlambat (2) kedatangan siswa yang tidak tepat waktu karena oang tua terlambat mengantarkannya. dengan membuat kebijakan pembiasaan kedisiplinan yang dimulai dari guru sebagai contoh bagi muridnya Ahmad Yasin, S.Pd menyampaikan "untuk pembiasaan kedisiplinan ini maka kami memulai dari mendisiplin guru, karena dengan itu lebih mudah untuk bisa dicontoh oleh siswanya".

Kedisiplinan alat yang ampuh dalam mendidik karakter. Banyak orang sukses karena menegakkan kedisiplinan. Sebaliknya, banyak upaya membangun sesuatu tidak berhasil karena kurang atau tidak disiplin. Banyak agenda yang telah ditetapkan tidak dapat berjalan karena kurang disiplin. Menanamkan prinsip agar peserta didik memiliki pendirian yang kokoh

[53] Abubakar Basyarahil, "*Kebijakan Publik dalam Perspektif Teori Siklus Kebijakan*". *Publika*, 2 Juli, 2013, 3

merupakan bagian yang sangat penting dari strategi menegakkan disiplin. Penegakan disiplin dapat dilakukan dengan peningkatan motivasi, pendidikan dan latihan, kepemimpinan, pnegakan atua dan penerapan *reward and panisment.*[54]

Sedangkan perencanaan kebijakan di SD Islam Arrisalah yaitu sesuai yang disampaikan oleh Ahmad Yasin, S.Pd "kita menciptakan forum dan kegiatan sebagai sarana dan penunjang dalam penguatan pembinaan kedisiplinan di lingkungan sekolah dan asrama. Dan beberapa yang sudah disepakati bersama adalah mengadakan pertemuan mingguan guru bersama pimpinan pondok dalam hal ini yaitu kyai dan lingkup guru SD Islam Arrisalah, membuat daftar hadir guru, guru piket, *tabkir* (apel pagi dengan siswa), membuat kelas bengkel". Peneliti menemukan di SD Islam Arrisalah telah ada dan memulai bahwa kepala sekolah telah membuat formulasi kebijakan yang ingin dilakukan sebagai bagian dari usaha perencanaan kebijakan yang akan dilakukan oleh kepala sekolah.

Formulasi kebijakan atau yang disebut juga dengan peramalan yaitu menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang masalah yang akan terjadi di masa yang akan datang sebagai akibat dari diambilnya alternatif, termasuk tidak melakukan sesuatu. Langkah ini dapat menguji masa depan yang *plausible*, potensial, dan secara normatif bernilai, mengestimasi akibat dari kebijakan yang ada atau yang diusulkan, mengenai kendala-kendala yang mungkin akan terjadi dalam pencapaian tujuan dan mengestimasi kelayakan politik (dukungan dan oposisi) dari berbagai pilihan. Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi maslaah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan, dan tindakan legislatif.[55]

Tahapan selanjutnya dalam perumusan kebijakan adalah rekomendasi dan penetapan. Peneliti mrnemukan bahwa di SD Islam Arrisalah ada musyawarah awal tahun untuk memulai dan menetukan

[54] M. Furqon Hidayatullah, *Pendidikan Karakter : membangun Pradaban Bangsa,* 49

[55] H.M. Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori, Aplikasi , dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada: 2015), 80.

program dan kebijakan yang disepakati bersama untuk dijalankan satu tahun kedepan selain ada musyawarah mingguan dan bulanan sebagai evaluasi bersama.

Suatu rumusan kebijakan baru dipandang final setelah disahkan peserta perumusan kebijakan formal. Pengesahan atau legalitas adalah suatu konstitutional alternatif pemecahan maslah terpilih yang selama ini diupayakan. Pengesahan ini penting, agar siapapun yang bermaksud diikat oleh rumusan kebijakan tersebut, akan secara jelas dapat mengenai sasarannya. Rekomendasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternatif yang akibatnya di masa mendatang telah diestimasikan melalui peramalan. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap adopsi kebijakan. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastian, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuatan pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administratif bagi implementasi kebijakan. Rekomendasi membantu mengestimasi tingkat resiko dan ketidakpastiaan, mengenali eksternalitas dan akibat ganda, menentukan kriteria dalam pembuat pembuatan pilihan, dan menentukan pertanggungjawaban administratife bagi implementasi kebijakan.[56]

PONOROGO

[56] Ibid, 83

BAB V
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN SISWA

A. Pelaksanaan Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa

No	Tahapan Kebijakan	Kebijakan	Teknik Pengumpulan Data	Data
1	Pelaksanaan kebijakan	Membuat aturan kedisplinan di lingkup sekolah dan asrama	Wawancara dengan kepala sekolah (Ahmad Yasin,S.Pd) dan bagian pengasuhan santri (Wahibul Ibtida') Dokumentasi	Ahmad Yasin, S.Pd menyampaikan bahwa di SDI Arrisalah ini ada siswa yang mukim dan yang tidak mukim. Sehingga membuat aturan yang lebih untuk santri yang mukim karena lebih lama tinggal di pesantren sedangkan siswa yang pulang pergi mereka belajar di sekolah sampai jam 13.00 selebihnya dirumah.[57] Masih menurut Ahmad Yasin sedangkan pelaksana penegakan kedisiplinan yaitu

[57] Ahmad Yasin, *Wawancara*, ruang kepala sekolah, 11-02-2019

				bagian pengasuhan sanri, seluruh guru dan tim pemimbing asrama Wahibul Ibtida (bagian Pengasuhan santri) menyampaikan santri yang mukim apabila waktunya belajar dikelas mereka mengikuti disiplin kelas selebihnya adalah mengikuti disiplin di asrama. Termasuk kedisiplinan di ruang makan atau waktu olahraga dan waktu bersih diri.[58]
2.	Pelaksanaan kebijakan	Menciptakan tradisi atau pembiasaan kedisiplinan santri SDI Arisalah yaitu dengan mendisiplin guru terdahulu sebagai figur	Wawancara dengan Ahmad Yasin, S.Pd (Kepala Sekolah SDI Arrisalah)	Ahmad Yasin menyampaikan bahwa guru adalah sebagai contoh di kelas maupun di luar kelas dan diasrama maka dibuat aturan (1) Tanda tangan kehadiran 10 menit sebelum mulai mengajar (2) membuat guru piket (*muroqib*)

[58] Wahibul Ibtida', Wawancara, ruang kelas 5, 14-02-2019

		dan contoh bagi santri		yang tugasnya adalah mengontrol kelas. (3) Mengadakan kumpul dua pekanan yang membahas tentang proses belajar mengajar (4) berkumpul dengan pengasuh dan pengurus asrama.[59] Juga memberikan arahan kepada wali agar mengantarkan anaknya lebih awal agar tidak terlambat karena keterlambatan anak biasanya karena wali terlambat mengantarkan ke sekolah.
			Wawancara dengan Mada Indarta (bagian kurikulum)	Untuk menciptakan pembiasaan kedisiplinan dari kurikulum membuat kegiatan dan slogan berbentuk tulisan juga termuat dalam tema tentang adab di pelajaran *hadist, ayatul muhtaroh, mahfudzot dan aqidah akhlaq*.

[59] Ahmad Yasin, *Wawancara*, ruang kepala sekolah, 11-02-2019

				Lalu mengadakan apel pagi biasa disebut "*tabkir*" yang diadakan setiap pagi 15 menit sebelum masuk kelas, yang diawali dengan do'a bersama, nasihat singkat, motifasi dan maklumat jika ada.[60]
3	Pelaksanaan kebijakan	Mengadakan pembinaan kedisiplinan	Wawancara dengan Ahmad Yasin,S.Pd (kepala sekolah)	Pembinaan guru adalah suatu hal yang penting yaitu dilakukan setiap hari kamis siang. Bergantian kamis pekan ini pembinaan dan evaluasi guru bersama pimpinan (kyai) dengan seluruh guru dari semua jenjang pendidikan yang ada di Pondok Modern Arrisalah. Pertemuan kedua yaitu kamis selanjutnya pembinaan dan evaluasi di internal SD Islam Arrisalah. Sedangkan pembinaan kedisiplinan siswa dilakukan semua guru,

[60] Mada Indarta, *Wawancara*, ruang guru, *13-02-2019*

				pengasuhan santri dan pengurus asrama. Diantaranya adalah pembacaan tata tertib (tengko) diawal semester dan menemempelkannya di asrama dan dikelas, menindak langsung pelanggar disiplin, membuat kelas bengkel, memanggil orang tua, pembinaan pada saat pagi hari ketika "tabkir" apel pagi yaitu berupa teguran dan nasihat bagi yang melanggar peraturan. [61]

B. Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa

Tindak lanjut dari perumusan kebijakan adalah implementasi kebijakan. Kepala sekolah SD Islam Arrisalah telah merumuskan dan mengidentifikasi masalah kedisiplinan untuk dijadikan langkah dalam pengambilan kebijakan dalam meningkatkan kedisiplinan siswa. Ahmad Yasin, S.Pd meyampaikan "disini ada dua model siswa yang mukim dan yang tidak mukim sehingga kita membuat aturan yang lebih untuk santri

[61] Ahmad Yasin, *Wawancara*, ruang kepala sekolah, 11-02-2019

yang mukim karena mereka disini 24 jam sedangkan yang tidak mukim mereka belajar disekolah sampai jam 13.00 selebihnya mereka dirumah".

Wahibul Ibtida' (bagian pengasuhan santri) menyampaikan santri yang mukim apabila waktunya belajar dikelas mereka mengikuti disiplin di kelas selebihnya mereka mengikuti disiplin di asrama termasuk displin ketika diruang makan, waktu olahraga dan saat bersih diri". Peneliti menemukan adanya monitoring di SD Islam Arrisalah sebagai bagian dari implementasi kebijakan yaitu menurut Ahmad Yasin, S.Pd "(1) diadakannya tanda tangan absen guru 10 menit sebelum jam masuk mengajar (2) membuat piket (muroqib) yang tugasnya adalah mengontrol kelas (3) mengadakan kumpul pekanan yang membahas tentang poses belajar mengajar yaitu diadakan pada hari kamis siang (4) berkumpul dengan pengasuh dan pengurus asrama". sedangkan pelaksana penegakan kedisiplinan yaitu bagian pengasuhan sanri, seluruh guru dan tim pemimbing asrama.

Dari keterangan diatas peneliti menemukan bahwa pemantauan (monitoring) menyediakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang akibat dari kebijakan yang diambil sebelumnya. Ini membantu pengambil kebijakan pada tahap implementasi kebijakan. Yang mana dalam proses implementasi kebijakan merupakan sebuah proses yang menetukan sekaligus menegangkan. Karena dalam proses ini menjadi sebab akhir dari semua kebijakan yang sudah diambil. Seandainya rumusan kebijakannya sudah dibuat bagus namun tidak ada tindak lanjut berupa impelementasi maka usaha perumusan kebijakan tidak ada artinya.

Sedangkan pelaksana kebijakan dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di SD Islam Arrisalah adalah bagian pengasuhan sanri, seluruh guru dan tim pemimbing asrama. Pelaksana kebijkan ini menjadi penanggung jawab atas jalan tidaknya kedisiplinann yang ada di sekolah.

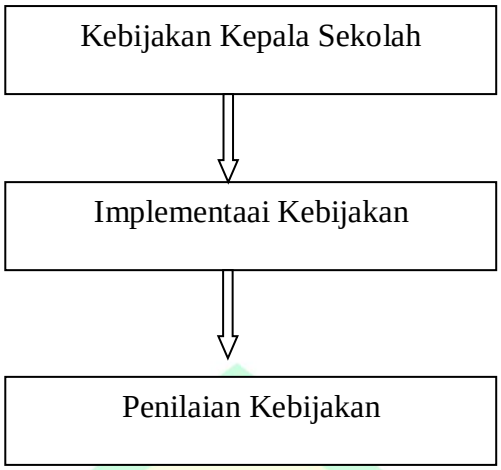

Sehingga pemantauan membantu menilai tingkat kepatuhan dan program, mengidentifikasi hambatan dan rintangan implementasi, dan menemukan letak pihak-pihak yang bertanggungjawab pada setiap tahap kebijakan. Di mana implementasi tidak hanya dilihat dari pendekatan kepatuhan semata, tetapi juga melihat bagaimana meraih hasil-hasil program yang diinginkan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga implementasi menjadi lebih kompleks.[62]

Mada Indarta menyampaikan "untuk menciptakan pembiasaan kedisiplinan selain langsung dilakukan bersama sama dari kurikulum membuat kegiatan membersihkan tempat makan setelah selesai makan bersama, mengawali dengan do'a bersama, mengontrol kelas dan asrama juga membuat slogan tulisan yang ditempel di tempat-tempat tertentu, mengadakan apel pagi (*tabkir*) 15 menit sebelum masuk kelas yang diawali dengan do'a bersama, nasihat singkat, motifasi dan maklumat jika ada" . disini peneliti menemukan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya berupa kepatuhan akan tetapi bagaimana meraih hasil hasil program yang diinginkan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Pembinaan kedisiplian di SD Islam Arrisalah dilakukan dengan pembinaan guru dan siswa, Ahmad Yasin, S.Pd menyampaikan "pembinaan guru diadakan pada saat hari kamis siang saat kumpul pekanan sedangkan pembinaan kedisiplinan siswa dilakukan oleh semua guru, pengasuhan santri

[62] Ibid, 91

dan pengurus asrama, diantaranya ialah pembacaan tengko (peraturan yang harus ditaati) diawal semester dan menempelnya di kelas dan diasrama, menindak langsung pelanggar disiplin, membuat kelas bengkel dan memanggil oang tua, juga pembinaan santri pada saat apel pagi yaitu memberi nasihat dan teguran bahkan sangsi bagi santri yang melanggar peraturan pada hari kemarin atau pada saat itu juga misalnya terlambat hadir ke sekolah atau kelengkapan yang kurang, pakaian tidak rapi, rambut yang tidak rapi terlalu panjang yang perlu dipendekkan atau kebersian anggota badan dan lain sebagainya" ini bagian dari pembinaan kedisiplinan yang dilaksanakan oleh SD Islam Arrisalah.

Menurut Ali Imron disiplin dibedakan menjadi tiga macam. *Pertama*, disiplin yang dibangun berdasarkan konsep *otoritarian.* Menurut konsep ini, peserta didik di sekolah dikatakan mempunyai disiplin tinggi apabila peserta didik ingin duduk tenang sambil memperhatikan uraian guru ketika sedang mengajar. *Kedua*, disiplin yang dibangun berdasarkan konsep *permissive.* Menurut konsep ini, peserta didik seharusnya diberi kebebasan seluas-luasnya di dalam kelas dan sekolah. Peraturan-peraturan di sekolah tidak selalu mengikat perbuatan peserta didik yang menurutnya baik. *Ketiga*, disiplin yang dibangun berdasarkan konsep kebebasan yang terkendali atau kebebasan yang bertanggung jawab.

Disiplin demikian, memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada peserta didik untuk berbuat apa saja, tetapi konsekuensi dari perbuatan itu, haruslah ia tanggung. Menurut konsep kebebasan terkendali ini, peserta didik memang diberi kebebasan, asal yang bersangkutan tidak menyalah gunakan kebebasan yang diberikan, sebab tidak ada kebebasan mutlak di dunia ini dan ada batasan-batasan tertentu dalam kehidupan bermasyarakat ataupun di lingkungan sekolah.

Menurut Nasrun bahwa dalam proses kebijakan hanya ada tiga komponen yang saling berkaitan yaitu: (1) kebijakan itu sendiri, (2) pelaku kebijakan, dan (3) lingkungan. Kebijakan merupakan isi yang menjadi komitmen dari kebijakan, sedangkan pelaku kebijakan disebut juga sebagai

stakeholder. Adapun yang dimaksud dengan lingkungan adalah keadaan sosial politik, sosial budaya, sosial ekonomi, pertahanan dan keamanan.[63]

IAIN PONOROGO

[63] Faried Alie .Andi Syamsu Alam. et.al. *Studi Analisa Kebijakan Konsep, Teroi dan Aplikasi Sampai Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah.* Bandung: Refika Aditama. 2012. 88

BAB VI

EVALUASI KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN KEDISIPLINAN SISWA

A. Penilaian Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa

NO	Tahapan Kebijakan	Kebijakan	Teknik Pengumpulan Data	Data
1	Evaluasi kebijakan	Membuat aturan kedisplinan di lingkup sekolah dan asrama	Wawancara dengan Ahmad Yasin, S.Pd (Kepala Sekolah) SD Islam Arrisalah	Adanya buku penghubung santri non mukim, buku prestasi belajar, adanya buku catatan pelanggaran siswa, Begitu juga adanya pemeriksaan kelengkapan belajar santri.[64]
2	Evaluasi kebijakan	Menciptakan tradisi atau pembiasaan kedisiplinan santri	Wawancara dengan Ahmad Yasin, S.Pd (Kepala Sekolah SD Islam Arrisalah) Mada Indarta	Ahmad Yasin Menyampaikan bahwa Tindak lanjut dari tanda tangan kehadiran guru yang selalu kita evaluasi agar tepat waktu sesuai kesepakatan aturan yng

[64] Ahmad Yasin, *Wawancara*, ruang kepala sekolah, 11-02-2019

			(Bagian Kuikulum)	telah ditetapkan, dan laporan guru piket mingguan.[65] Mada Indarta, S.Pd menyampaikan bahwa Guru wajib mengecek langsung keadaan kelas dan sekolah sesuai tata tertib jadwal harian sekolah terutama guru kelas. Kalau yang diasrama setiap hari selalu ada kegiatan evaluasi kedisplinan yang diadakan setelah sholat ashar yang dilaksanakan oleh pengurus asrama Pengasuhan santi selalu berkoordinasi dengan pengurus asrama terkait seluruh kegiatan santri yang mukim.[66]
3	Evaluasi kebijakan	Mengadakan pembinaan kedisiplinan	Bahar Beniko, S.Pd (Bagian pembimbing santri dan	Memberikan sangsi dan teguran keapada siswa yang melanggar sesuai penilaian atau skoring

[65] Ahmad Yasin, *Wawancara*, ruang kepala sekolah, 11-02-2019
[66] Mada Indarta, *Wawancara*, ruang guru, *13-02-2019*

			konseling)	yang telah ditentukan sekolah. Mengintensifkan hubungan dengan wali murid bagi siswa yang melanggar disiplin. Mengefektifkan kelas bengkel yang kurang maksimal dijalankan karena faktor ruangan khusus yang belum trsedia sehingga kita memakai mushola untuk kelas bengkel, juga kurang maksimalnya tim konseling karena beberapa tugas yan bersamaan atau merangkap wali kelas.[67]

B. Klarifikasi nilai-nilai Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kedisiplinan Siswa

Evaluasi membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan tentang ketidaksesuaian antara kinerja kebijakan yang diharapkan dengan yang benar-benar dihasilkan. Jadi ini membantu pengambilan kebijakan pada tahap penilaian kebijakan terhadap proses pembuatan

[67] Bahar Beniko, *Wawancara*, ruang guru, 18-02-2019

kebijakan. Evaluasi tidak hanya menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan, tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali masalah.[68]

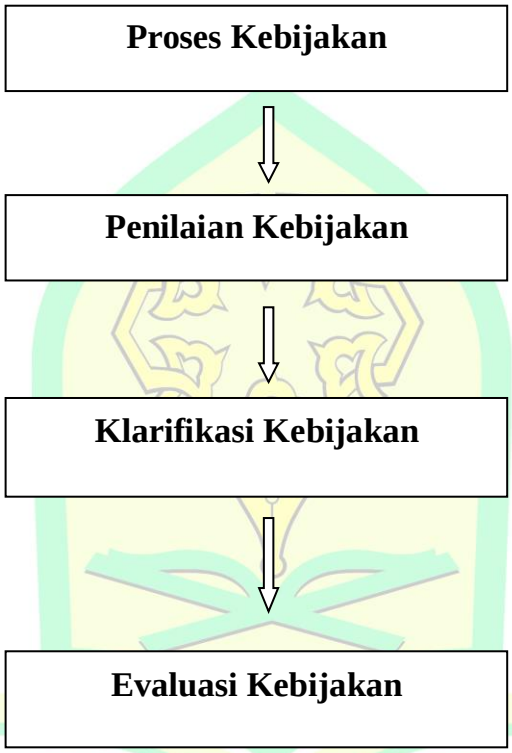

Peneliti menemukan dari hasil evaluasi kebijakan peningkatan kedisiplinan siswa di SD Islam Arrisalah, Ahmad Yasin menyampaikan "untuk mengetahui hasil dari penerapan peraturan disiplin adanya buku penghubung santri, buku prestasi belajar, adanya buku catatan pelanggaran siswa dan juga kegiatan pemeriksaan kelengkapan belajar santri"

Sedangkan dalam menciptakan tradisi disiplin siswa peneliti menyimpulkan adanya beberapa kegiatan yang diadakan oleh SD Islam

[68] Ibid, 29

Arrisalah sesuai penuturan Ahmad Yasin, S.Pd “tindak lanjut dari tanda tangan kehadiran guru selalu kita evaluasi agar tepat waktu sesuai kesepakatan aturan yang telah ditetapkan dan laporan guru piket mingguan karena selalu ada guru yang terlambat dalam mengajar”. Menurut Mada Indarta (bagian kurikulum) “guru wajib mengecek langsung keadaan kelas terutama wali kelas sebagai bagian dari kegiatan pembiasaan siswa, sedangkan yang di asrama setiap hari ada kegiatan evaluasi kedisiplinan yang dilaksanakan oleh pengurus asrama” Evaluasi dari pembinaan kedisiplinan siswa peneliti menemukan beberapa kegiatan seperti yang disampaikan Bahar Beniko (bagian Pengasuhan santri) “Memberikan sangsi dan teguran keapada siswa yang melanggar sesuai penilaian atau skoring yang telah ditentukan sekolah. Mengintensifkan hubungan dengan wali murid bagi siswa yang melanggar disiplin. Mengefektifkan kelas bengkel yang kurang maksimal dijalankan karena faktor ruangan khusus yang belum tersedia sehingga kita memakai mushola untuk kelas bengkel, juga kurang maksimalnya tim konseling”.

Secara khusus evaluasi implementasi menurut Ripley adalah (a) ditujukan untuk melaksanakan evaluasi terhadap proses (b) menambah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab pada perspektif apa yang terjadi dan perspektif kepatuhan; dan (c) ditujukan untuk melakukan evaluasi aspek-aspek dampak kebijakan yang terjadi dalam jangka pendek.[69]

Peneliti menemukan pengaruh dai evaluasi yang diterapkan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa yaitu dengan adanya kepatuhan dalam melaksanakan kebijakan baik dari guru (tenaga pendidik) dan peserta didik sehingga mampu melaksanakan program-program sekolah walaupun masih ada kekurangan di beberapa aspek sehingga hasil dari evaluasi ini berdampak pada kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan kedisipinan siswa.

[69] Ibid, 32

BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di SD Islam Arrisalah adalah membuat program santri mukim dan non mukim, menjadikan guru sebagai teladan bagi siswanya, menciptakan forum dan kegiatan untuk penguatan kedisiplinan siswa, musyawarah besar tahunan yang dihadiri oleh direktur dan tim bidang pendidikan yayasan, guru, pengasuhan santri dan pengurus asama untuk menentukan dan menyepakati bersama program-program kebijakan kedisiplinan.
2. Implementasi kebijakan kepala sekolah dalam meningkatkan kedisiplinan siswa di SD Islam Arrisalah berjalan sesuai dengan perumusan kebijakan yang telah ditetapkan. Pelaksana kebijakan dalam hal ini adalah seluruh *stakeholder* yang ada sedangkan penanggung jawabnya adalah wakil kepala bagian kurikulum dan kesiswaan, dengan menerapkan evaluasi pekanan yang menyeluruh menghasilkan program yang diinginkan bisa berjalan sesuai yang kebijakan, juga adanya monitoring kepala sekolah sehingga memunculkan kepatuhan dan kesungguhan.
3. Evaluasi kebijakan dilakukan oleh kepala sekolah SD Islam Arrisalah dalam meningkatkan kedisiplinan adalah dengan mengevaluasi program-program kebijakan yaitu tentang aturan kedisiplinan dilingkup sekolah dan asrama, menciptakan pembiasaan kedisiplinan siswa, pembinaan kedisiplinan guru dan siswa. Dari evaluasi ini menggambarkan realita yang muncul, menjelaskan pola pola yang ada, dari proses implementasi kebijakan dan monitoring menghasilkan nilai-nilai kebijakan yang bisa diklarifikasi dengan fakta yang ada. Adapun kekurangannya adalah kurang maksimalnya dibeberapa aspek karena faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai sehingga mengharapkan agar sekolah dapat memenuhinya agar terlaksana kebijakan yang telah ditentukan.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan peneliti memberikan saran sebagai bahan masukan yang diajukan kepada pembaca yaitu

1. Masih banyaknya kekurangan dalam penulisan, isi, dan masih ada kesalahan sehingga mengahrapkan masukan, kritikan agar karya ilmiah ini kedepannya bisa lebih bermanfaat bagi lembaga pendidikan secara umum dan khususnya SD Islam Arrisalah yang berada dilingkungan pesantren Pondok Moden Arrisalah Slahung Ponorogo sehingga bisa menjadi rujukan.
2. Untuk lembaga SD Islam Arrisalah agar selalu berinovasi dan meningkatkan mutu pendidikan terutama pada aspek kedisiplinan dalam banyak hal sehingga menghasilkan keluaran yang bermutu baik dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Untuk Kepala Sekolah penguatan pada aspek monitoring dan evaluasi kebijakan adalah hal yang selalu dilaksanakan karena dari sinilah diantara sebab munculnya ketaatan dan kesungguhan dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan dan disepakati.
4. Untuk penulis selanjutnya agar membahas lebih tentang fungsi kebijakan dalam manajemen sekolah.
5. Mohon masukan dan saran serta kritikan dari pembaca yang mampu memberikan kebaikan dan kebaikan bagi karya ilmiah ini sehingga bermanfaat bagi yang lainnya. Terimakasih.

PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Abdussalam, *Manajemen Insani dalam Pendidikan,*Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013

Anderson James E., *Public Policy Making,* Holt, Rinchard & Winston, New York, 2013

Alie Faried .Andi Syamsu Alam. et.al. *Studi Analisa Kebijakan Konsep, Teroi dan Aplikasi Sampai Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah.* Bandung: Refika Aditama. 2012.

Basuki, *Manajemen Kesiswaan (peserta didik),* Jakarta, 2007

Bahtiar Yoyon Irianto, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan*, Jakarta, PT Grafindo Persada, 2012

Basyarahil Abubakar, "*Kebijakan Publik dalam Perspektif Teori Siklus Kebijakan*". *Publika*, 2 Juli, 2013

Daien Amir Indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Malang: Usaha Nasional, 1973

Dewi, Ratna "*Kebijakan Pendidikan di tinjau dari Segi Hukum Kebijakan Publik*", *Ilmu Hukum* 2016.

Dun Wiliam , *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua.* terj.Samodra Wibawa et.al. Yogyakarta: Gadjah Mada University. 2003

Fischer Frank, et al, *Handbook Analisis Kebijakan Publik Teori, Politik dan Metode,* ter, Imam Baihaqi et al, Bandung: Nusa Media, 2014

Hasbullah H.M., *Kebijakan Pendidikan dalam Perspektif Teori, Aplikasi , dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia,* Jakarta: RajaGrafindo Persada: 2015

PONOROGO

Hidayatullah M. Furqon, *Pendidikan Karakter: Membangun Peradaban Bangsa*, Surakarta: Yuma Pressindo, 2010

Jann Wenner and Kai Wegrich, *handbook of Public Policy Analysis*.

Koentjoroningrat, *Penelitian dalam Masyarakat* Jakarta: Gramedia, 1998.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008.

Ma‟mur Jamal Asmani, *Tips Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif, Inovatif***,** Yogyakarta: DIVA Press, 2010

Munadi Muhammad dan Barnawi, *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*, Jakarta, Ar-Ruz Media, 2011.

Prihatini Eka, *Menejemen Peserta Didik***,** Bandung: Alfabeta, 2011.

Semiawan Conny, *Pendidikan Keluarga Dalam Era Global*, Jakarta: PT Prenhallindo, 2002.

Subari, *Supervisi Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Sukarna, *Dasar-dasar Manajemen*, Bandung: Mandar Maju, 1992

Sutopo Mada. *Buku Pengantar Kuliah Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Universitas Yogyakarta. 2005

Sulistyorini, *Menejemen Pendidikan Islam Konsep, Strategi dan Aplikasi*,Yogyakarta: Teras, 2009

Tilaar H.A.R dan Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012

Wibowo Agus, *Pendidikan Karakter, Strategi membagun Karakter Bangsa Berperadapan*, Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

PONOROGO

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur‟an,*Al-Qur''an dan Terjemahnya...,* 1099.

IAIN
PONOROGO